PEMBERDAYAAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Disusun Oleh:

Al Mira Fidela

2001046041

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa

Nama	: Al Mira Fidela
NIM	: 2001046041
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Konsentrasi	: Pengembangan Masyarakat Islam
Judul	: Pemberdayaan Narapidana Melalui Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 September 2024

Pembimbing

Muhammad, S.I.P.M.P.P
NIP. 1987112819031008

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

Pemberdayaan Narapidana Melalui Program Pembinaan Kemandirian Pada Lapas Kelas 1 Semarang

Disusun Oleh:

Al Mira Fidela (2001046041)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 September 2024 dan dinyatakan **LULUS** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I	Sekertaris/Penguji II
Dr. Agus Riyadi, M.S.I	**Asep Firmansyah, M.Pd**
NIP. 198008162007101003	**NIP. 199005272020121003**
Penguji III	Penguji IV
Dr. M. Mudhofi, M.Ag	**Dr. Sulistio, S. Ag., M.Si**
NIP. 196908301998031001	**NIP. 197002021998031005**

Mengetahui
Pembimbing

Muhammad, S.I.P., M.P.P
NIP. 1987112819031008

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada Tanggal 27 September 2024

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag
NIP. 19710[illegible]71998031003

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni dari hasil kerja saya sendiri dan di dalam pengerjaannya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 September 2024

Al Mira Fidela

NIM : 2001046041

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirrobbil alamin segaala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* nanti. Sebuah perjalanan panjang yang berliku-liku telan mengantarkan penulis ke penghujung studi dan semua ini tentunya adalah proses yang tidak berdiri sendiri. Penulis menyadari dalam penyelesaian skrispi yang berjudul *Pemberdayaan Narapidana Melalui Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang* tidak akan berarti tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Bapak Abdul Karim, M.Si., selaku Sekretaris jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Bapak Muhammad, S.I.P., M.P.P selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen, pegawai dan seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan berbagai pengetahuan dan pengalam an selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang.
7. Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang, yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penggalian data penelitian.

8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah, yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Kepada kedua orang tua penulis terutama Bapak Heri Jauhari dan Ibu Sri Handayani yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
10. Kepada kedua kakak penulis, Siti Aqmarina Lailani, M.Pd dan Ivana Hapsari, S.Pd yang selalu memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi.
11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu teman-teman kepengurusan HMJ 2020, Fauzan Ahmad, Amaruddin Alfath, Guntur Nurviansyah, Aditya Hendrawan, Rizcky Masholihul, Alfin Ramadhani, Darmawanti Putri, Aghitsna Rohmah, Evie Wijayanti dan April Trikunarti yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman spesial PMI penulis, Aghitsna Rohmah, Nur Mufrodah, Darmawanti Putri, Nadila Nur Komalasari, Sarah Raudhotul Aulia, Qothrunnada Salsabila yang selalu membersamai penulis dan memberikan dukungan dalam setiap proses perjalanan perkuliahan, sehingga hidup penulis menjadi lebih berwarna.
13. Kepada teman seperjuangan penulis, Imanniatul Afitikha, Ninis Mukaromatul Hikmah, Evi Raudhotul Jannah, Faradela Nur Ayuni dan Naela Izzatil, terima kasih telah mewarnai hidup penulis selama di Ngaliyan.
14. Kepada Evie Wijayanti, Aghitsna Rohmah dan Ninis Mukaromatul Hikmah, terima kasih telah menemani penulis ketika melakukan penelitian di Lapas Kelas 1 Semarang.
15. Kepada SADEWA 2020, Terima kasih atas semangat dan kebersamaan yang tak tergantikan. Bersama kalian, setiap langkah terasa lebih ringan dan penuh arti. “Jadilah dimanapun kalian berada!”
16. Seluruh teman-teman posko 10 KKN reguler di Karangayar Tuntang. Semoga kebersamaan kita selama masa KKN akan menjadi kenangan indah dan motivasi untuk terus berkarya di masa depan.
17. Seluruh teman PMI angkatan 2020 yang membersamai penulis dalam susah senang dan duka dalam menyelesaikan studi.

18. Dan dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan usaha yang telah dicurahkan selama proses penyelesaian skripsi ini. Walaupun tidak selalu mudah, perjalanan ini telah menjadi pelajaran berharga. Semoga langkah ini menjadi motivasi untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang.

Penulis berharap semoga segala amal kebaikan semua pihak dalam membantu penulis selama ini mendapatkan balasan yang indah dari Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu karya yang baik, namun penulis menyadari bahwa sepenuhnya masih banyak kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Dan dengan segala kerendahan hati, penulis mengaharapkan kritik serta saran untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua, fi dunya wal akhirat. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 17 September 2024

Al Mira Fidela

2001046041

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Kedua orang tua penulis, Bapak Heri Jauhari dan Ibu Sri Handayani dan kedua kakak saya kak Siti Aqmarina Lailani, M. Pd. dan kak Ivana Hapsari, S. Pd.

Terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan, kasih sayang, pesan, bimbingan, pembelajaran, serta dukungan kuat sehingga menjadikan energi semangat yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Terima kasih atas segala perjuangan yang dilakukan demi menyukseskan anak perempuan terakhirnya ini dalam meraik gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan kesehatan kepada Bapak dan Ibu. Aamiin.

MOTTO

وَكِتْمَانُ الشِّدَّةِ حَتَّى يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّكَ مُتَنَعِّمٌ

-Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.

- Imam Syafi'I -

ABSTRAK

Al Mira Fidela (2001046041*), Pemberdayaan Narapidana Melalui Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Permasyaraktan Kelas 1 Semarang*

Upaya memberdayakan narapidana melalui program pembinaan kemandirian narapidana ini bertujuan agar mereka dapat mandiri setelah keluar dari penjara, baik melalui kerja sama atau mendirikan usaha sendiri. Pemberdayaan ini membantu rehabilitasi dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, meningkatkan peluang kesuksesan, dan mengurangi residivisme. Penelitian mendalam tentang efektivitas program ini di Lapas diperlukan untuk merancang program yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta untuk mengurangi kriminalitas di masyarakat. Berdasarkan keadaan, minat dan pemahaman untuk belajar berkerjasama dalam upaya meningkatkan kemandirian dan keterampilan dalam narapidana ditemukan rumusan masalah ini yaitu 1) Bagaimana proses pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang. 2) Bagaimana efektivitas pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang dan efektivitas pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan: 1) Proses pemberdayaan narapidana melalui program pembinaan kemandirian pada Lapas Kelas 1 Semarang melalui enam tahap yaitu tahapan pemaparan masalah, analisis masalah, pencapaian tujuan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan dan evaluasi. 2) Keefektivitasan pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang adalah pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan. Selain itu untuk mengukur keefektifan bisa menggunakan indikator kinerja lapas, yaitu proporsi pelayanan bermasyarakatan yang memenuhi standar proporsi narapidana dan tahanan yang patuh terhadap hukum jumlah narapidana yang terlibat dalam pekerjaan atau pelatihan keterampilan selama masa pembinaan dengan tujuan mencapai kemandirian individu.

Kata Kunci : Pemberdayaan Narapidana, Kemandirian

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

MOTTO ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **6**

C. Tujuan Penelitian **7**

D. Manfaat Penelitian **7**

E. Tinjauan Pustaka **8**

F. Metode Penelitian **10**

1. Jenis Penelitian 10
2. Lokasi Penelitian 12
3. Sumber Data 12
4. Metode Pengumpulan Data 12
5. Subyek/ Informan Penelitian 14
6. Analisis Data 14
7. Uji Validitas Data 16
8. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KERANGKA TEORI 19

A. Pemberdayaan Masyarakat..... 19

1. Pengertian Pemberdayaan 19

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 21

3. Tahapan pemberdayaan masyarakat..... 23

4. Proses Pemberdayaan 25

7. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan 27

B. Warga Binaan..... 28

1. Pengertian Warga Binaan 28

2. Hak-Hak Warga Binaan 28

C. Pembinaan 29

1. Pengertian Pembinaan 29

2. Metode Pembinaan 30

3. Tahap pembinaan Narapidana 32

D. Kemandirian..... 33

E. Lembaga Permasyarakatan..... 34

1. Pengertian Lembaga Permasyarakatan..... 34

2. Tujuan Lembaga Permasyarakatan 35

F. Efektivitas Pemberdayaan Narapidana 36

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN & PAPARAN DATA ……40

A. Profil Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang 40

B. Program Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas 1 Semarang Sebagai Upaya Pemberdayaan Narapidana 53

BAB IV ANALISIS DATA..... 66

A. Analisis Proses Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang 66

B. Analisis Efektivitas Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang 87

BAB V PENUTUP 99

A. KESIMPULAN 99

B. SARAN 100

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN 106

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 117

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 23 Agustus 2024 47
Table 2.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 24 Agustus 2024 48
Table 3.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 25-26 Agustus 2024 48
Table 4.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 27 Agustus 2024 49
Table 5.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 28 Agustus 2024 50
Table 6.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 29 Agustus 2024 50
Table 7.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Kasus Kejahatan di Tanggal 23 Agustus 2024 51
Table 9.1 Data WBP Yang Mengikuti Progam Pembinaan Kemandirian (Bimbingan Kerja) 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas 1 Semarang 42
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidang Giatja 58
Gambar 3.1 Assesment Calon Peserta Program Pembinaan Kemandirian 62
Gambar 4.1 Pelatihan di Unit Bakery 63
Gambar 5.1 Rotan 64
Gambar 6.1 Kaligrafi 64
Gambar 7.1 Assesment Calon Peserta Pembinaan Kemandirian 71
Gambar 8.1 Denah Ruang Kerja keterampilan 73
Gambar 9.1 Tahapan pelaksanaan Progam Pembinaan Kemandirian 76
Gambar 10.1 Assesment Calon Peserta Program Pembinaan Kemandirian 77
Gambar 11.1 Pelatihan di Unit Bakery 79
Gambar 12.1 Pemberian Sertifikat Pelatihan Rotan 81
Gambar 13.1 Rapat Monev dengan PT. Philnesia International 82
Gambar 14.1 Wawancara dengan Bapak Hamdan, Kasubag Lapas Kelas 1 Semaran 106
Gambar 15.1 Wawancara dengan Ibu Sapto, Staf Kepegawaian 106
Gambar 16.1 Wawancara dengan Bapak Ridwan, staf kasubag Lapas Kelas 1 Semarang 107
Gambar 17.1 Wawancara dengan Bapak Nanda, staf bimker program pembinaan kemandirian 107
Gambar 18.1 Wawancara dengan Bapak Firman dan Bapak Nanda, staf bimker program pembinaan kemandirian. 108
Gambar 19.1 Wawancara dengan narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian 108
Gambar 20.1 Surat izin riset dari Kemenkum HAM Kanwil Jateng 109
Gambar 21.1 Surat izin riset dari UIN Walisongo 109
Gambar 22.1 Surat izin pra riset dari UIN Walisongo 109
Gambar 23.1 Data WBP berdasarkan kasus & lama pidana di Lapas Kelas 1 Semarang 110

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan terhadap proses pemasyarakatan telah mengalami perubahan, di mana lembaga pemasyarakatan tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar narapidana dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik (Ramadhan et al., 2021: 182). Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, tujuan permasyarakatan adalah sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering disebut Lapas memainkan peran krusial dalam membimbing para narapidana menuju perubahan yang positif. Mereka akan mendapatkan bimbingan yang menyeluruh, baik dalam aspek sosial maupun spiritual. Namun, proses ini tidaklah mudah dan memerlukan pertimbangan serta dukungan dari berbagai faktor. Untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang ideal dan fasilitas yang memadai menjadi kunci utama dalam mendukung proses pembinaan para narapidana (Saputra, 2020: 6).

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia khususnya Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang dapat menjadi wadah yang berguna untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama kedua kalinya dan menyadari kesalahannya. Lapas Kelas 1 Semarang merupakan institusi pemasyarakatan yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Sebagai lembaga kelas 1, Lapas ini merupakan salah satu dari beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam

menjalankan tugas pemasyarakatan. Lapas kelas 1 umumnya menangani narapidana dengan tingkat kejahatan yang berat atau dengan jumlah narapidana yang relatif banyak. Lapas ini berfungsi sebagai tempat untuk menjalani masa hukuman, rehabilitasi, dan pembinaan bagi narapidana (Search, 2023). Di dalam Lapas Kelas 1 Semarang, terdapat program-program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir. Selain itu, Lapas Kelas 1 Semarang juga memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keamanan dalam lingkungan lembaga serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua narapidana tanpa memandang status sosial atau jabatan (*Rencana Strategis Lapas Kelas I Semarang 2020-2024*, 2024).

Dalam menjalankan kegiatan Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang sangat memerlukan bantuan dan dukungan dari kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Selain itu, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) serta semua tingkatan kepemimpinan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya juga sangat penting (*Rencana Strategis Lapas Kelas I Semarang 2020-2024*, 2024: 6). Oleh karena itu, untuk memenuhi hak asasi manusia, Lapas Kedungpane menerapkan pembinaan dengan prinsip-prinsip dasar, salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada narapidana agar mereka dapat bersiap untuk kembali hidup di masyarakat dan menjadi anggota yang produktif dalam tatanan kehidupan sosial (Anggriawan, 2017: 34).

Dalam kehidupan bermasyarakat, keterkaitan antara mantan narapidana dengan masyarakat sangatlah signifikan, karena untuk menjalani kehidupan yang berkelanjutan, manusia memerlukan interaksi sosial yang melibatkan banyak orang. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk kebutuhan akan makanan, serta memahami pentingnya peran orang lain dalam mendukung

keberlangsungan hidup mereka (Effendy, 2006: 2). Meskipun fungsi pengendalian sosial dari masyarakat memiliki peranan penting, namun tidak melalui tindakan menjauhi dan memberi stigmatisasi sebagai penjahat kepada mereka. Sebaliknya, pendekatan yang lebih efektif adalah dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka, sehingga mereka dapat mengalami perubahan yang positif dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu (Mahmudah, 2017).

Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Zainul Akhyar yang menyatakan bahwa masyarakat yang masih mematuhi norma-norma kesopanan dalam kehidupan sosialnya cenderung melihat mantan narapidana sebagai sumber masalah dalam masyarakat. Mereka berpandangan bahwa orang yang telah keluar dari penjara masih dianggap sebagai ancaman karena sebelumnya telah melakukan tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku. Ketidakpercayaan ini semakin diperkuat oleh ketidakmampuan mantan narapidana untuk menunjukkan perubahan perilaku setelah keluar dari penjara. Akibatnya, mereka sering mengalami diskriminasi non-formal, seperti sulitnya diterima kembali di lingkungan sosial dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Label sebagai bekas narapidana membuat mereka kehilangan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat (Akhyar et al., 2014).

Dalam upaya membina kemandirian narapidana, pembinaan kemandirian ini bertujuan agar setelah narapidana keluar dari penjara, mereka dapat mandiri dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau mendirikan usaha sendiri, sehingga mereka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Adisaputra, 2022: 177). Lapas memberikan layanan pelatihan keterampilan kepada narapidana. Mereka diberi pelatihan dalam beberapa keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat individu masing-masing. Secara keseluruhan, peningkatan pembinaan kemandirian harus difokuskan pada pendekatan pengembangan keterampilan, termasuk memulihkan harga diri individu sebagai anggota masyarakat yang percaya akan potensi produktifnya dalam pembangunan negara (Equatora, 2018:

20). Oleh karena itu, mereka juga didorong untuk mengembangkan keterampilan khusus yang memungkinkan mereka untuk hidup secara mandiri dan berkontribusi pada pembangunan. Terdapat sekitar 17 keterampilan yang tersedia di Lapas, seperti pembuatan kerupuk, kerajinan tempe, pembuatan kursi rotan, pembuatan kain batik, kaligrafi, layanan laundry, cake and bakery, anyaman dan lain sebagainya (Anasmk, 2020).

Dengan begitu, bapak Hamdan selaku kabag umum Lapas kelas 1 Semarang menegaskan bahwasanya pentingnya proses pembagian keterampilan kepada warga binaan. Menurutnya, keterampilan harus diberikan dengan teliti dan sistematis. Langkah pertama adalah meminta warga binaan untuk memilih keterampilan yang paling diminatinya. Namun demikian, beliau juga menekankan bahwa bagi mereka yang tidak menemukan minat pada keterampilan yang tersedia, akan ada bimbingan khusus untuk menemukan alternatif yang sesuai. Sebagai ilustrasi, bila seseorang berkeinginan untuk belajar anyaman tetapi tidak tersedia, maka jalur pengajaran akan dialihkan ke bidang pertukangan kayu. Jadi program keterampilan yang akan dilakukakan oleh narapidana dapat berjalan dengan baik sesuai minat yang diinginkan.

Pemberdayaan narapidana melalui program pembinaan kemandirian ini membantu dalam proses rehabilitasi dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dengan memberdayakan warga binaan, mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses dalam kehidupan setelah pembebasan, yang dapat membantu mengurangi tingkat kembali ke dunia kriminal atau residivisme. Melalui pemberdayaan, warga binaan dapat mengembangkan kemandirian mereka, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga mereka lebih siap untuk hidup mandiri setelah pembebasan. Dengan demikian, pemberdayaan warga binaan bukan hanya penting untuk membantu individu secara pribadi, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan inklusif secara keseluruhan (Yuli, 2023).

Pemberdayaan harus diarahkan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu, tidak berdaya, atau belum memiliki keterampilan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan hidup dan berkontribusi dalam pembangunan. Narapidana termasuk dalam kelompok masyarakat yang lemah dari segi ekonomi, sehingga penting untuk melakukan pemberdayaan bagi mereka. Dengan demikian, narapidana tidak hanya menyadari kesalahan yang telah diperbuat, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan dan menjadi lebih mandiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan narapidana. Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan agar mereka mampu menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lalu, tetapi juga untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang berguna untuk kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan (Anyaq et al., 2022).

Dengan program pemberdayaan yang tepat, narapidana dapat mengembangkan potensi diri, memperbaiki kualitas hidup mereka, dan pada akhirnya menjadi individu yang lebih mandiri. Tidak hanya itu, pemberdayaan narapidana juga memiliki dampak yang lebih luas, yaitu mengurangi risiko mereka kembali melakukan tindakan kriminal, serta membuka peluang bagi mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan mampu berkontribusi secara positif. Untuk mencapai kesuksesan program, penting bagi penyelenggara program untuk merancang bentuk pembinaan dengan baik dan melakukan evaluasi terhadap program tersebut untuk mengidentifikasi kelemahan dari pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang berhasil meraih penghargaan utama dalam kategori pembinaan terbaik untuk narapidana di Lapas dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Saut Poltak Silitonga, dalam acara perayaan Menuju 58 Tahun Pemasyarakatan

yang diadakan di The Sultan Hotel and Residence Jakarta (Kedungpane, 2023). Meskipun Lapas ini diakui secara luas sebagai model terbaik dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian, evaluasi mendalam terhadap efektivitas program-program ini tetaplah penting. Lapas-lapas terbaik ini seringkali menjadi pusat perhatian karena reputasi mereka dalam memberikan layanan yang unggul dalam pembinaan narapidana.

Walaupun Lapas ini telah mendapatkan pengakuan sebagai Lapas terbaik dalam hal pembinaannya, pertanyaan akan tetap muncul mengenai sejauh mana program-program pembinaan kemandirian yang diterapkan di sana, apakah benar-benar efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa sumber daya yang diinvestasikan dalam pembinaan kemandirian memberikan hasil yang optimal (Ramadhan et al., 2021).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program pembinaan kemandirian di Lapas secara lebih terperinci. Penelitian semacam itu dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi para pengelola Lapas dalam merancang program-program yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian narapidana dan mengurangi tingkat kriminalitas kembali di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai batasan untuk melakukan penelitian, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang?
2. Bagaimana efektivitas pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan warga binaan program kemandirian pada Lapas Kelas 1 Semarang.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian pada Lapas Kelas 1 Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian tentang pemberdayaan warga binaan melalui program kemandirian pada Lapas Kelas 1 Semarang dapat memberikan kontribusi pada perkembangan dan pemahaman berbagai teori yang terkait. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait hal tersebut.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi akademik, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Dan tentunya temuan atau konsep baru dapat membuka wawasan dan memperkaya literatur ilmiah.
   b. Bagi warga binaan, program kemandirian dapat memberikan dorongan pada rasa percaya diri warga binaan. Melalui pencapaian dalam program tersebut, mereka dapat merasa lebih maju, berdaya, mandiri dan mampu menghadapi tantangan hidup.
   c. Bagi Lapas Kedungpane Semarang, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas program kemandirian yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program-program yang sudah ada atau merancang program baru yang lebih efektif.
   d. Bagi Kementrian Hukum dan HAM, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga untuk merancang dan meningkatkan kebijakan pemasyarakatan. Juga dapat membantu meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi di lapas-lapas

yang dikelola oleh Kemenkumham. Yang nantinya akan melibatkan pemantauan pelaksanaan program pemberdayaan serta pengukuran dampaknya terhadap warga binaan.

E. Tinjauan Pustaka

Ada banyak penelitian tentang Lembaga Permasyarakatan, akan tetapi yang membahas tentang pemberdayaan warga binaan belum terlalu banyak, berikut ada beberapa penelitian yang membahasnya, diantaranya seperti yang di teliti oleh (Marthalena & Jauhari, 2023) menyatakan bahwa pemberdayaan warga binaan dilakukan melalui langkah-langkah seperti perencanaan kegiatan, pelaksanaan pemberdayaan dan evaluasi pemberdayaan. Proses pemberdayaan narapidana meliputi perencanaan pemberdayaan, penelusuran bakat dan potensi, pembinaan agama, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan potensi yang dimiliki narapidana. (Angreni et al., 2023) juga mengungkapakan bahwasanya pemberdayaan warga binaan dilakukan melalui program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan *softskill* dan efikasi diri agar siap kembali ke tatanan masyarakat setelah masa tahanan usai. Proses peningkatan kemampuan narapidana melalui pelatihan efikasi diri dan pengembangan keterampilan softskill dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur, yaitu mengamati narapidana untuk memahami kebutuhan mereka, kemudian dilanjutkan dengan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan terakhir, menganalisis dokumentasi historis terkait. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan ini, dapat dirancang program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu narapidana. Pernyataan diatas diperkuat oleh (Gasela, Yesi, 2021) yang mana pemberdayaan narapidana dilakukan setelah proses terlaksananya program pemberdayaan narapidana ini yaitu dengan pemilihan narapidana melalui sidang TPP (Tim Pengamat Permasyarakatan), pelatihan pemberdayaan narapidana, dan terakhir pelaksanaan pemberdayaan narapidana. Setelah menyelesaikan pelatihan,

narapidana secara langsung menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas mereka. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan mereka keterampilan yang diperlukan agar dapat hidup mandiri dan bersaing dengan baik ketika kembali ke masyarakat. Bahwa dari tiga penelitian tersebut berbicara tentang proses pemberdayaan tanpa mempertimbangkan standar proses pemberdayaan sebagai acuan untuk menilainya. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai proses dan efektivitas dalam program pemberdayaan narapidana ini dengan memperhatikan standar proses dan indikator efektivitas pemberdayaan narapidana.

Selanjutnya yaitu penelitian tentang progam pembinaan kemandirian yang di bahas oleh (Santoso dkk., 2022). Yang mana proses pembinaan kemandirian yang dilakukan berupa pemberian pelatihan keterampilan kepada narapidana untuk memproduksi simplisia jamu, jamu seduh, dan sabun cair guna untuk meningkatkan motivasi dan semangat berwirausaha narapidana agar mampu melanjutkan hidup pasca masa hukuman. Selanjutnya yaitu penelitian oleh (Jefri, 2021) Program pembinaan ini berdampak positif bagi narapidana dalam mencegah mereka untuk kembali terlibat dalam kejahatan setelah mereka dibebaskan, dengan keterampilan yang diperolehnya. Pentingnya program ini juga tercermin dari dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam membantu narapidana untuk hidup mandiri. Bahwasanya dalam penelitian tersebut menjelaskan program pembinaan kemandirian berhasil, dengan acuan para narapidana bisa mandiri. Akan tetapi juga penting untuk memahami preferensi dan minat konsumen terhadap produk yang diproduksi oleh warga binaan. Pengetahuan ini menjadi kunci dalam merancang strategi pemasaran yang efektif untuk pengembangan produk tersebut. Karena masyarakat warga binaan akan merasa maju, berdaya, mandiri, sejahtera apabila hasil dari produk pelatihannya bisa berlaku jangka panjang.

Selanjutnya masih penelitian tentang program pembinaan kemandirian yang di teliti oleh (Anggita & Pangestuti, 2024) Penelitian ini membahas tentang efektivitas program pembinaan kemandirian, Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi cara program pembinaan kemandirian diterapkan dalam membimbing narapidana dalam aktivitas kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang dengan tujuan membantu mereka mengembangkan keterampilan serta peluang usaha di masa depan. Namun (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019) Menjelaskan bahwasanya pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan belum mencapai tingkat optimal. Ini terbukti dari perbandingan jumlah narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dengan jumlah yang aktif mengikuti program pembinaan kemandirian yang masih sangat rendah. Ada beberapa tantangan dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, alokasi anggaran yang tidak memadai, serta kurangnya minat dari narapidana. Selain itu, peran petugas pemasyarakatan dalam memotivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan juga masih kurang. Dapat dilihat dari dua penelitian diatas bahwasanya program pembinaan kemandirian berjalan belum optimal karena berbagai kendala yang telah dijelaskan. Untuk itu diperlukan sekali penelitian tentang efektifitas program pembinaan kemandirian yang mengacu kepada visi. misi, dan tujuan dari Lapas tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Karena perlunya jenis penelitian ini untuk meneliti tentang pemberdayaan narapidana dalam program pembinaan kemandirian. Metode kualitatif ini dipilih karena fleksibilitas dalam menanggapi keadaan yang rumit yang mana berkemampuan untuk menggali

hubungan secara kompleks, serta sensitivitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri dan menggali pengaruh bersama terhadap nilai-nilai yang muncul dalam penelitian (Tanzeh, 2009: 108).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah) (Sugiyono, 2018: 225) karena penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan pemberdayaan narapidana dalam program pembinaan kemandirian yang mana adanya interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu, dan dilaksanakan dalam kondisi yang biasa terjadi. Karena penelitian ini nanti akan menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata yang tertulis atau lisan dari partisipan serta perilaku yang dapat diamati (Maleong, 2004: 4).

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menyelidiki dengan cermat bagaimana pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kedungpane. Langkah ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk observasi secara langsung, melakukan wawancara dengan staf penjara dan narapidana, serta menganalisis dokumen terkait program tersebut. Hasil studi kasus akan memberikan gambaran menyeluruh tentang proses, strategi, hambatan, dan hasil dari program pembinaan kemandirian. Yang mana menurut (Rahardjo, 2017: 3) studi kasus merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik itu pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa tersebut melalui pendekatan ilmiah yang intensif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yang lebih dikenal sebagai LP Kedungpane, merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang terletak di Kantor Wilayah Jawa Tengah. Posisinya berada di jalan Semarang Boja, antara Perumahan Permata Puri dan BSB – Bukit Semarang Baru.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang secara langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2012: 137) dan data sekunder yang mendukung data primer atau sumber kedua (Kaharuddin, 2021: 5). Data primer akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan staf lapas yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian, fasilitator program, dan warga binaan yang menjadi peserta program tersebut. Sedangkan data selunder akan diperoleh dari laporan tahunan atau periodik yang diterbitkan oleh Lapas Kedungpane atau instansi terkait yang mencakup evaluasi program pembinaan kemandirian, pencapaian, statistik terkait pelaksanaan program dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan *(field research)* dengan melakukan peninjauan langsung pada lembaga atau instansi yang menjadi fokus penelitian, yang mana berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan observasi dengan langsung mendatangi Lembaga Permasyarakatn Kelas I Semarang. Observasi ini bertujuan untuk mengamati warga binaan dalam menjalankan program pembinaan kemandirian serta para petugas yang bersangkutan dengan program tersebut. Yang mana

pengertian dari observasi sendiri adalah tindakan mengamati suatu kejadian atau peristiwa dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam, mencari jawaban, atau mencari bukti terhadap fenomena sosial selama periode waktu tertentu tanpa mempengaruhi fenomena yang diamati (Suprayogo, 2001: 5).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengambil sampel dari orang yang berhubungan dengan progam pembinaan kemandirian pada Lapas Kelas I Semarang.. Cara yang dilakukan dalam memilih narasumber yaitu dengan cara penelitian individu atau informan yang mampu memberikan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui interaksi berbicara yang disengaja antara dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu (Nugrahani, 2014: 124). Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara terstruktur, hal yang akan disiapkan adalah kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya (Sugiyono, 2016: 386). Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data adalah tambahan yang berguna untuk melengkapi metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen melibatkan pengumpulan fakta dan data kualitatif yang luas dari bahan tertulis atau dokumen yang tersimpan. Pentingnya menggunakan teknik ini guna untuk mendapatkan dokumen internal dari Lapas Kedungpane, seperti laporan tahunan, evaluasi program, dan dokumen administratif lainnya yang terkait dengan program pembinaan kemandirian. Dokumen ini dapat memberikan wawasan tentang pelaksanaan program, pencapaian yang telah dicapai, serta evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak lapas.

5. Subyek/ Informan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sumber data dengan mempertimbangkan faktor tertentu (Sugiyono, 2018: 218). Pertimbangan tertentu ini dapat mencakup situasi di mana individu tersebut dianggap memiliki pengetahuan paling luas tentang topik yang diharapkan, atau mungkin karena kedudukannya yang berpengaruh sehingga memfasilitasi peneliti dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti.

Sumber informasi utama peneliti yaitu warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian di Lapas Kedungpane, mengenai bagaimana pengalaman dalam mengikuti program tersebut. Selanjutnya yaitu staf lapas (petugas pelaksana, petugas sosial, petugas keamanan) bagaimana pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian, serta peran dan kontribusi mereka dalam mendukung pemberdayaan warga binaan. Selanjutnya ada juga fasilitator program yang mana penelitian dapat memperdalam pemahaman tentang pendekatan yang digunakan, tantangan dalam mengajar, serta peran mereka dalam mendukung pembinaan kemandirian warga binaan. Pihak terkait seperti halnya lembaga atau mitra terterntu dapat memberikan perspektif tambahan tentang implementasi program, dukungan yang diberikan, serta evaluasi terhadap efektivitas program.

6. Analisis Data

Analisis data ini merupakan proses sistematis dalam mencari dan mengorganisir catatan dari hasil observasi, wawancara, dan sumber data lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang pemberdayaan narapidana dalam program pembinaan kemandirian ini dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain Noeng Muhadjir (1998: 104). Lebih lanjut, untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis

harus dilanjutkan dengan upaya untuk menemukan makna dari data tersebut (Rijali, 2018: 84). Teknik analisi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Reduksi data *(data reduction)*

Reduksi data merupakan proses analisis yang melibatkan penyaringan, pemilihan, pemusatan, serta pengorganisasian data dalam suatu metode tertentu, sehingga kesimpulan akhir dapat dihasilkan dan diverifikasi (Yusuf, 2017: 408). Dalam proses ini, data-data yang telah dikumpulkan disortir, dipilih yang relevan, dan difokuskan pada aspek-aspek yang penting untuk penelitian. Kemudian, data tersebut diorganisasikan sesuai dengan metode tertentu, seperti pengelompokan berdasarkan tema atau pola yang muncul. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian akan menjadi lebih fokus dan memberikan informasi yang lebih padat mengenai program pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lapas Kelas I Semarang yang nantinya diharapkan dapat mencapai kesimpulan akhir yang lebih terperinci dan memungkinkan verifikasi yang lebih baik atas temuan yang diperoleh dari analisis data.

b. Penyajian data *(data display)*

Dalam konteks ini, "display" merujuk pada sekumpulan informasi yang telah diatur dengan baik sehingga memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang umum adalah narasi teks yang menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau (Yusuf, 2017: 409). Penyajian data adalah proses penggabungan informasi yang diperoleh dari kegiatan tertentu, yang bertujuan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan tertentu. Ini dapat berupa narasi yang disusun berdasarkan observasi lapangan dan juga grafik, bagan, atau matriks yang

menggabungkan informasi menjadi satu kesatuan yang komprehensif (Agusta, 2003).

Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data secara jelas, akurat, dan mudah dimengerti yang berkaitan dengan pemberdayaan narapidana melalui program pembinaan kemandirian pada lapas Kelas I Semarang.

c. Penarikan kesimpulan *(conclusion drawing)*

Hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data. Kesimpulan disampaikan dalam bentuk deskriptif mengenai objek penelitian dengan merujuk pada analisis yang telah dilakukan (Yusuf, 2017: 409). Kesimpulan disampaikan dalam bentuk deskriptif mengenai objek penelitian dengan merujuk pada analisis yang telah dilakukan (Gunawan, 2013: 80).

Dalam penarikan kesimpulan peneliti menyimpulkan dari beberapa hasil observasi, wawwancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan narapidana melalui program pembinaan kemandirian pada Lapas Kelas I Semarang.

7. Uji Validitas Data

Dalam melakukan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan uji kredibilitas, yang mana meliputi :

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan sumber data yang sebelumnya telah dijumpai atau yang baru. Melalui perpanjangan pengamatan ini, hubungan antara peneliti dan narasumber akan semakin terjalin. Dalam proses ini, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran data yang telah diperoleh sebelumnya. Fokus dari perpanjangan pengamatan ini adalah untuk memastikan keabsahan data penelitian, dengan menguji apakah data yang telah

diperoleh sebelumnya tetap valid setelah diuji kembali di lapangan. Jika setelah pengecekan ulang di lapangan, data tetap terbukti benar, maka data tersebut dapat dianggap kredibel, dan perpanjangan pengamatan dapat diakhiri (Sugiyono, 2018: 270).

b. Meningkatkan ketekunan

Dengan meningkatkan ketelitian maka akan melibatkan pengamatan yang lebih teliti dan terus-menerus, sehingga kebenaran data dan urutan peristiwa dapat tercatat secara tepat dan terorganisir. Dengan meningkatkan ketelitian ini, peneliti dapat melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran data yang ditemukan, serta memberikan deskripsi data yang akurat dan teratur tentang apa yang diamati (Sugiyono, 2018: 272).

c. Triangulasi

Triangulasi dalam menguji kredibilitas data mengacu pada proses memeriksa data dari berbagai sumber dengan metode yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Ini melibatkan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2018: 273).

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan memverifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda.

b) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data yang sama menggunakan teknik yang berbeda dari sumber yang sama.

c) Triangulasi waktu

Untuk menguji kredibilitas data, pengecekan dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam berbagai waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil

pengecekan menghasilkan data yang berbeda, proses tersebut dapat diulangi secara berulang hingga kepastian data tercapai.

8. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan ini ditujukan untuk mempermudah dalam memahami serta membahas masalah yang diteliti. Pembahasan ada lima bab, seperti dibawah ini :

Bab I berisikan megenai uraian yang mendasari penelitian dilakukan, diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka. Dan penelitian ini akan di jelaskan secara mendalam dan terperinci.

Bab II berisikan Kajian Teori. Pada bab ini peneliti akan menguraikan konsep tentang pemberdayaan warga binaan, pembinaan, kemandirian warga binaan dan lembaga permasyarakatan dalam pemberdayaan warga binaan melalui program pembinaan kemandirian pada Lapas Kelas 1 Semarang.

Bab III yaitu Metode Penelitian, dimana peneliti akan membahas tentang jenis penelitian apa yang sesuai, lokasi penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data hingga uji validitas atau uji keabsahan data.

Bab IV berisikan Hasil dan Pembahasan penelitian yang telah dilakukan, bab ini berisi tentang proses pemberdayaan warga binaan dan ke efektivitasan dalam penanganan program pembinaan kemandirian ini.

Bab V yaitu penutup, yang berisikan tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, serta lampiran dokumentasi pada saat peneliti berada di lapangan dan pada objek penelitian yang lainnya yang masih konteks penelitian.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

"Pemberdayaan" dalam buku Pengembangan Komunitas diterjemahkan dari bahasa Inggris "empowerment" yang berarti memberikan atau meningkatkan kekuatan kepada masyarakat yang kurang beruntung atau lemah (Alfitri, 2011: 22). Artinya adalah kita harus memberikan sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang diperlukan agar individu atau kelompok masyarakat dapat mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri, berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pemberdayaan juga melibatkan proses memberdayakan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuan mereka dan untuk menciptakan perubahan positif dalam komunitas mereka. Pemberdayaan, menurut Jim Ife dalam tulisan yang disunting oleh Charles, mengacu pada memberikan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri, serta berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka dan berpengaruh terhadapnya (Charles, 2009: 24).

Menurut Nadhir (2009: 1) mengungkapkan bahwa "pemberdayaan adalah suatu proses transformasi diri masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif, menuju kondisi sejahtera dan kemandirian." Sebagai suatu tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang diinginkan dari suatu perubahan sosial. Dalam Suharto (2006: 66) Pemberdayaan dapat diimplementasikan melalui prinsip atau strategi pemberdayaan yang dikenal sebagai pengaturan pemberdayaan (empowerment setting), yairu ada tiga azas. Pertama,

azas mikro yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu. Model ini disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (Task Centered Approach). Kedua, azas mezzo yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok lain sebagai media intervensi. Ketiga, azas makro disebut juga strategi system besar (large system strategy) karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas.

Pemberdayaan masyarakat bermakna menyediakan dukungan kepada masyarakat dengan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatur kehidupan mereka sendiri dan berkontribusi aktif dalam kehidupan masyarakat (Riyadi, 2021: 67). Pemberdayaan masyarakat juga dimaknai proses mendukung masyarakat agar memiliki peran utama dalam meningkatkan kegiatan sosial, situasi, dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat biasanya terjadi ketika mereka aktif berpartisipasi, karena keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam upaya pemberdayaan tersebut (Hamid et al., 2023).

Maka dari itu pentingnya memberdayakan masyarakat dengan cara memberikan mereka akses terhadap sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. Dengan memberdayakan masyarakat, mereka dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan dan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan di mana individu merasa didukung dan memiliki kontrol atas nasib mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat bukan bertujuan untuk membuat masyarakat semakin bergantung pada program-program pemberian (charity), karena pada dasarnya adalah setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan dari usaha sendiri. Tujuan akhir dari pemberdayaan

masyarakat adalah menjadikan masyarakat lebih mandiri, memampukan, dan membangun kekuatan untuk memajukan diri sendiri kearah kehidupan yang lebih baik lagi secara berkesinambungan (Mulyawan, 2016: 89). Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengelola diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam konteks warga binaan pemasyarakatan.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Mardikanto (2015) dalam (Maryani, Dedeh., 2019: 8-10) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Perbaikan kelembagaan

   Dengan melakukan perbaikan dalam kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan termasuk dalam mengembangkan jaringan kemitraan usaha. Kelembagaan yang berkualitas akan mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas yang ada sehingga lembaga tersebut dapat berfungsi secara optimal. Dengan demikian, tujuan dari lembaga tersebut akan lebih mudah dicapai, dan target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dapat direalisasikan dengan lebih efisien. Sebuah lembaga yang baik akan memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas, serta program kerja yang terukur. Setiap anggota lembaga akan bertanggung jawab atas tugas yang sesuai dengan kompetensi masing-masing pada periode waktu yang ditentukan. Hal ini akan membuat anggota merasa memiliki peran yang penting dalam kemajuan lembaga tersebut, dan saling memberikan motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan mereka melalui pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang mereka miliki dari waktu ke waktu.

2. Perbaikan usaha

Setelah dilakukan perbaikan pada kelembagaan, diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja bisnis lembaga tersebut. Selain itu, upaya dan perbaikan dalam kegiatan kelembagaan diharapkan akan meningkatkan kualitas bisnis yang dilakukan, yang dapat memberikan kepuasan kepada semua anggota lembaga serta memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat sekitar. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengembangkan lembaga tersebut sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan anggota yang terlibat.

3. Perbaikan pendapatan

   Peningkatan bisnis diharapkan akan menyebabkan peningkatan pendapatan atau penghasilan bagi semua anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain, perbaikan dalam bisnis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh mereka, termasuk pendapatan bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Perbaikan lingkungan

   Saat ini, banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, jika kualitas manusia lebih baik, seperti memiliki pendidikan tinggi atau memiliki tingkat kecerdasan yang baik, kemungkinan besar manusia tidak akan merusak lingkungan tersebut.

5. Perbaikan kehidupan

   Kualitas hidup masyarakat bisa diukur dari berbagai indikator atau faktor, seperti tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan atau daya beli tiap keluarga. Dengan perbaikan pendapatan, diharapkan akan terjadi korelasi positif dengan kondisi lingkungan yang lebih baik. Akibatnya, peningkatan pendapatan dan perbaikan lingkungan diharapkan bisa meningkatkan kondisi kehidupan setiap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

6. Perbaikan masyarakat

Jika setiap keluarga menikmati kehidupan yang berkualitas, hal itu akan menciptakan masyarakat yang secara keseluruhan memiliki standar hidup yang lebih baik. Tingkat kehidupan yang lebih tinggi ini didukung oleh kondisi lingkungan, baik secara fisik maupun sosial, yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

3. Tahapan pemberdayaan masyarakat

Menurut (Maryani, Dedeh., 2019: 13-14) pemberdayaan memiliki tujuh tahapan yang dilakukan, yaitu :

1. Tahap persiapan

Dalam fase ini, terdapat dua langkah yang harus dilakukan. Pertama, persiapan tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh pekerja komunitas. Kedua, persiapan lapangan yang umumnya dilakukan secara non-direktif.

2. Tahapan pengkajian

Tahapan ini merupakan proses evaluasi, yang dapat dilakukan baik secara individu maupun melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Di sini, petugas harus berupaya untuk mengenali masalah dan kebutuhan yang dirasakan oleh klien, serta sumber daya yang dimiliki oleh mereka. Hal ini bertujuan agar program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegaiatan

Dalam tahapan ini, petugas berperan sebagai agen perubahan atau agen pertukaran secara partisipatif dengan melibatkan warga untuk memikirkan masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasi masalah tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat

diharapkan dapat merumuskan beberapa alternatif program dan kegiatan. Setiap alternatif tersebut harus dianalisis untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih dapat menjadi program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

4. Tahap pemformalisasi rencana aksi

   Dalam tahapan ini, agen perubahan membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menetapkan program serta kegiatan yang akan dilakukan untuk menangani masalah yang dihadapi. Selain itu, petugas juga membantu dalam mengubah gagasan-gagasan mereka menjadi format tertulis, terutama jika terkait dengan pembuatan proposal kepada pihak yang menyediakan dana. Dengan cara ini, pihak penyandang dana akan memahami tujuan dan sasaran dari program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.

5. Tahap implementasi program atau kegiatan

   Dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, pentingnya peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjamin kelangsungan dari program yang telah dirancang. Kerjasama antara petugas dan masyarakat menjadi krusial dalam tahap ini karena terkadang rencana yang telah disusun dengan baik dapat mengalami penyesuaian saat dilaksanakan di lapangan. Pada tahap ini, sosialisasi program menjadi kunci agar seluruh peserta program memahami dengan jelas maksud, tujuan, dan sasaran program tersebut. Dengan demikian, implementasi program dapat berjalan lancar tanpa menghadapi hambatan yang signifikan.

6. Tahap evaluasi

   Pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya melibatkan partisipasi warga. Dengan keterlibatan mereka, diharapkan akan terbentuk suatu

sistem pengawasan internal dalam waktu singkat. Secara bertahap, hal ini dapat membangun komunikasi yang lebih mandiri di antara masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk jangka panjang.

7. Tahap terminasi

   Tahap terminasi adalah tahapan di mana hubungan formal dengan komunitas sasaran diakhiri. Pada tahap ini, diharapkan proyek dapat berhenti dengan segera. Artinya, masyarakat yang telah diberdayakan sudah mampu untuk mengelola dirinya sendiri agar dapat hidup lebih baik dengan mengubah kondisi sebelumnya yang tidak memadai untuk memastikan kehidupan yang layak bagi diri mereka dan keluarganya

4. Proses Pemberdayaan

Tahapan atau Proses Pemberdayaan Masyarakat Menurut Zubaedi (2013) tahapan atau proses pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuh tahapan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Tahap Pemaparan Masalah

   Pada tahap pertama ini dilakukannya dengan menentukan melalui pengelompokan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat biasanya menyadari terhadap permasalahan yang dihadapinya. Pada tahap ini fasilitator memberikan arahan informasi dan menfasilitasi musyawarah dan diskusi bersama warga.

2. Tahap Analisis Masalah

   Pada tahap kedua ini dengan menganalisis msalah yang ditemui. Dari tahap ini perlunya pengumpulan informasi muali dari jenis, ukuran dan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan sumber informasinya bisa diakses terhadap yang mempunyai berkepentingan.

3. Tahap Penentuan Tujuan

Penentuan tujuan ini menunjukkan pada visi dan tujuan jangka panjangnya. Sementara sasarannya ini mempunyai sifat yang khusus.sasaran ini yang diteteapkan terdiri dari kegiatan yang bisa dijadikaan analisis. Sasaran biasanya sering dimodifikasi untuk diperbarui sebagai strategi dan untuk mengarahkan berpikir permasalahan dengan sudut pandang berbeda.

4. Tahap Perencanaan tindakan

   Agen perubahan membantu kelompok masyarakat dalam merumuskan dan menentukan program aksi yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dan agen perubahan juga membantu apabila ada argumen membantu merumuskan gagasan mereka secara tertulis dengan hasil sebuah proposal kepada penyandang dana, dengan hal itu dengan proposal penyandang dana lebih cepat memahami tujuan dan sasaran program pemberdayaan. Dalam merencanakan aksi diperlukannya dan memperhatikan tenaga ahli peralatan tempat, informasi, faktor penghambat, waktu tersedia, pihak-pihak yang berpengaruh dalam program tersebut, pemain-pemain kunci.

5. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

   Pada tahap pelaksanaan kegiatan program yang telah dirancang dan harus adanya kolaborasi antara petugas agen of change dengan masyarakat untuk keberlangsungan program yang dikembangkan agar masyarakat juga paham tujuan, maksud dan sasarannya.

6. Tahap Evaluasi

   Tahap evaluasi merupakan prose pengawasan dari petugas pemberdayaan dan warga pada program yang sedang berjalan, dalam pengawasan ini partisipatif warga perlu di ikutkan. Pada tahap ini diharapkan dari program ini keberhasilannya bisa tercapai, dengan adanya evaluasi ini bisa mengetahui problem atau kendala yang ada sehingga pada kelanjutannya berikutnya bisa dijadikan

sebagai upaya untuk pemecahan permasalahan pada saat evaluasi itu dilakukan.

7. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Prinsip dari pemberdayaan berpengaruh pada proses pemberdayaan yang dilakukan, menurut (Najiati et al., 2005) ada beberapa prinsip pemberdayaan yaitu :

1) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip yang utama dalam melakukan pemberdayaan, dengan prinsip ini menunjukkan adanya tindakan yang sama dan kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi dan rendah antara satu dengan yang lainnya. Dinamika yang dibangun dalam prinsip ini adalah hubungan kesetaraan yang menanggap semua itu setara yang saling berbagi ilmu, pengalaman, keahlian sehingga dapat terjadi proses timbal balik menukar informasi.

2) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang bersifat partisipatif dapat menumbuhkan kemandirian. Tetapi untuk mencapai kemandirian diperlukan peran pendampinng yang melibatkan pendamping yang bersedia berpatisipasi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Prinsip Keswadayaan

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan memprioritaskan potensi masyarakat yang dimilikinya dari pada bantuan dari pihak lain, dengan kata lain konsep keswadayaan tidak memandang orang miskin bukanlah orang yang tidak berkemampuan, tetapi mereka mempunyai kemampuan sedikit. Maka dari itu perlunya menggali kemampuanya yang dijadikan sebagai modal awal proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsip ini tidak menolak dari bantuan orang lain melainkan bantuan orang lain dianggap sebaagai bahan penunjang yang bersifat materiil sehingga tidak melemahkan tingkat keswadayaan masyarakat

4) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu adanya proses berkelanjutan, pada awal proses pemberdayaan, peran pendamping akan lebih dominan dari pada masyarakatnya. Namun untuk jangka Panjang peran pendamping akan berkurang atau bahkan menghilang karena masyarakat mampu mengelola kegiatan secara mandiri

B. Warga Binaan

1. Pengertian Warga Binaan

Warga binaan atau narapidana adalah individu yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan, terpidana adalah individu yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan dan hukumannya sudah berkekuatan hukum tetap (Swilantari, 2022: 10). Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana mengarahkan dan menetapkan batasan serta cara memperbaiki warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar dapat menjadi individu yang utuh, menyadari kesalahan mereka, berupaya untuk memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perilaku kriminal. Dengan demikian, pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi yang bertujuan untuk mengubah sistem nilai para narapidana agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (Wulandari, 2015: 87).

2. Hak-Hak Warga Binaan

Hak-hak warga binaan diatur dalam undang-undang Republik Indonesia, yaitu dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilisasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan, jasmani dan rohani. (Yuli, 2023: 30) mengungkapkan bahwa pembinaan adalah langkah yang mendukung individu untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui upaya dan pengembangan kemampuan mereka sendiri. Mangunhardjana mengatakan bahwa pembinaan merupakan proses belajar di mana seseorang melepaskan apa yang sudah diketahuinya dan belajar hal-hal baru yang belum

dikuasainya. Tujuan dari proses ini adalah untuk membantu individu memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimilikinya, sambil juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan hidup dan pekerjaan yang sedang dijalani (Yuliani, 2014: 22).

Maka dari itu pembinaan adalah proses yang bertujuan untuk membantu individu mencapai kebahagiaan pribadi serta meningkatkan kualitas hidup mereka, sambil juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kemampuan dan potensi individu secara mandiri. Ini menekankan pentingnya upaya individu dalam mencapai tujuan mereka sendiri, yang pada gilirannya juga berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Dapat disimpulkan lagi bahwa pembinaan adalah suatu aktivitas dan proses belajar hal-hal baru yang bermanfaat untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik bagi individu yang sedang dibina, serta untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Proses pembinaan ini secara erat terkait dengan pemahaman praktis seperti pengembangan keterampilan yang dapat berguna dalam mencari pekerjaan.

2. Metode Pembinaan

Metode pembinaan adalah teknik dalam menyampaikan materi pembinaan dengan tujuan agar dapat diterima secara efektif dan efisien oleh narapidana, baik dalam mengubah pola pikir, perilaku, maupun tingkah laku. Terkait dengan kebutuhan narapidana, metode pembinaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:

1. Pendekatan dari atas *(Top Down Approach)*

   Dalam metode ini, materi pembinaan disampaikan oleh pembina atau telah disiapkan paket pembinaan bagi narapidana dari pihak yang mengatur. Narapidana tidak memiliki kebebasan untuk memilih jenis pembinaan yang akan mereka jalani, mereka

menerima pembinaan langsung dari para pembina. Materi yang dipilih dalam pembinaan ini umumnya bersifat standar, seperti pendekatan keagamaan, pengetahuan tentang negara dan bangsa, atau pengetahuan umum lain yang dianggap bermanfaat setelah mereka keluar dari penjara. Sementara pengetahuan yang lebih spesifik, seperti keterampilan, juga bisa diberikan.

Dalam melaksanakan pembinaan ini, perlu diperhatikan faktor situasi. Artinya, pembina harus mampu mengubah situasi dalam pembinaan agar sesuai dan disetujui oleh peserta pembinaan, sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan situasional individual. Semua narapidana yang terlibat dalam pembinaan tersebut akan terikat oleh situasi pembinaan yang telah dibuat. Keterikatan tersebut akan sangat bermanfaat karena melibatkan partisipasi sepenuh hati dan semangat yang sama dalam usaha untuk membangun diri sendiri.

2. Pendekatan dari bawah *(Bottom Up Approach)*

Pendekatan dari bawah adalah metode pembinaan narapidana yang memperhatikan kebutuhan individu dan kebutuhan belajar mereka. Tidak semua narapidana memiliki kebutuhan belajar yang sama atau minat yang serupa. Hal ini sangat bergantung pada karakteristik individu narapidana dan fasilitas pembinaan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan pembinaan ini menimbulkan tanggung jawab besar bagi para pembina, karena mereka harus memastikan tersedianya fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan. Meskipun jenis pembinaan dapat bervariasi, namun jika fasilitas dan sarana tidak memadai atau tidak tersedia, maka kebutuhan belajar dan pembinaan akan terbatas oleh ketersediaan fasilitas dan sarana yang ada (Yuliani, 2014: 28-29).

3. Tahap pembinaan Narapidana

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembinaan merupakan aktivitas yang melibatkan proses. Oleh karena itu, pembinaan memiliki serangkaian tahapan yang harus dilalui. Menurut (Yuliani, 2014:38) tahapan-tahapan pembinaan dalam konteks pembinaan narapidana dilaksanakan dalam tiga langkah, yaitu**:**

a. Tahap pertama bagi narapidana dimulai sejak mereka menjadi
b. narapidana hingga mencapai 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana mereka. Pembinaan narapidana pada tahap awal ini mencakup:
    1. Periode pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, yang berlangsung paling lama selama 1 (satu) bulan.
    2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
    3. Implementasi program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
    4. Evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
c. Tahap selanjutnya terbagi menjadi dua tahap lanjutan, tahap lanjutan pertama dimulai setelah pembinaan tahap awal berakhir hingga mencapai ½ (satu per dua) dari masa pidana; dan tahap lanjutan kedua dimulai setelah tahap lanjutan pertama berakhir hingga mencapai 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Tahap-tahap lanjutan ini mencakup:
    1. Perencanaan program pembinaan yang berkelanjutan.
    2. Implementasi program pembinaan yang berkelanjutan.
    3. Evaluasi pelaksanaan program pembinaan yang berkelanjutan.
    4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

d. Pembinaan tahap terakhir dimulai setelah tahap lanjutan berakhir hingga selesai masa pidana Narapidana. Pembinaan tahap terakhir ini mencakup:
    1. Perencanaan program integrasi.
    2. Implementasi program integrasi.
    3. Penyelesaian pelaksanaan pembinaan tahap terakhir.

D. Kemandirian

Istilah kemandirian berasal dari pembentukan kata keadaan atau kata benda dari kata dasar "diri" dengan awalan "ke" dan akhiran "an". Kemandirian tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut sebagai "self", karena diri menjadi inti dari kemandirian (Ali & Asrori, 2008: 109). Menurut (Rizalhadizan, 2022) ada beberapa definisi kemandirian menurut para ahli termasuk yang berikut:

a. Menurut Emil Durkheim

    Kemandirian merupakan salah satu komponen krusial dari moralitas yang berakar pada kehidupan sosial. Pertumbuhan dan peningkatan kemandirian terjadi karena dua faktor prasyarat:

    1. Disiplin, yang melibatkan adanya aturan tindakan dan otoritas yang diakui.
    2. Komitmen terhadap kelompok.

b. Menurut Masrun (1986:8)

    Kemandirian bisa dijelaskan sebagai sikap yang memampukan seseorang untuk bertindak secara independen, melakukan tindakan atas inisiatif dan kebutuhan pribadi, tanpa bergantung pada orang lain. Ini juga melibatkan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara orisinal atau kreatif, serta memiliki inisiatif yang tinggi. Orang yang mandiri mampu memengaruhi lingkungannya, memiliki keyakinan diri, dan merasa puas dengan usaha yang dilakukannya.

c. Menurut Kartini Kartono (1985:21)

Kemandirian seseorang akan tampak ketika ia menghadapi tantangan. Apabila ia dapat menyelesaikan masalah tanpa tergantung pada bantuan orang tua dan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal, ini menunjukkan kemampuannya untuk mandiri dan bersikap mandiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya kemandirian adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, siap bersaing untuk maju, ditandai dengan adanya sikap inisiatif dan mampu memecahkan masalahnya sendiri dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

E. Lembaga Permasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Permasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang juga dikenal sebagai tempat untuk memberikan pembinaan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang yang sama, pemasyarakatan diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan sistem, struktur institusi, dan metode pembinaan yang merupakan tahap akhir dari proses pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. (Swilantari, 2022: 8). Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa esensi dari pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan kepada narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan ini memerlukan adanya sebuah struktur yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan (Rensiana, Mouritia, 2018: 29).

Lapas merupakan lokasi dimana pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan. Esensinya, kedua kelompok ini, yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sama-sama

merupakan individu yang berada di Lapas berdasarkan keputusan pengadilan. Namun, perbedaannya diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), dimana narapidana adalah individu yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sedang menjalani hukuman atau kehilangan kebebasan di Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan yang diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM menerapkan sistem pemasyarakatan yang berfokus pada pembinaan, pengayoman, dan reintegrasi sosial narapidana tanpa motif balas dendam. Dalam konteks ini, Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada narapidana guna memberdayakan mereka agar dapat mengubah arah hidup menuju kehidupan yang lebih baik (W et al., 2013: 174). Maka dari itu pentingnya pendekatan pembinaan dan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan. Dengan mengutamakan pembinaan dan pengayoman, Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan komitmennya untuk membantu narapidana agar dapat berubah dan menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat. Pendekatan yang tidak mengandalkan balas dendam juga mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif dalam penanganan kejahatan. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pembinaan dan dukungan, harapannya adalah mereka dapat mengubah perilaku mereka dan mengambil langkah positif menuju kehidupan yang lebih baik setelah masa penjara mereka berakhir.

2. Tujuan Lembaga Permasyarakatan

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengubah Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang menyadari kesalahan, berusaha memperbaiki diri, dan mencegah pengulangan tindak pidana sehingga mereka bisa diterima

kembali oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini bertujuan agar mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta hidup dengan norma yang baik dan bertanggung jawab sebagai warga masyarakat (Rensiana, Mouritia, 2018: 34).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar mencapai kesempurnaan sebagai manusia, menyadari kesalahan, mengembangkan diri, dan mencegah pengulangan kejahatan sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Sleman, n.d.).

F. Efektivitas Pemberdayaan Narapidana

Efektivitas pemberdayaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kemandirian, keterampilan dan karakter dari masyarakat, termasuk narapidana. (Equatora, 2018). Efektivitas pemberdayaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan program-program pembinaan yang diterapkan saja, akan tetapi juga penting untuk memahami proses pemberdayaan yang mana proses pemberdayaan merupakan transformasi persepsi individu untuk memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan, serta memupuk kesadaran atau motivasi dalam diri individu. Interaksi atau stimulus eksternal yang diperlukan dalam proses ini, dengan salah satu cara adalah melalui pendidikan dan pelatihan (Davis & K, 1985).

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu institusi atau organisasi dalam menjalankan tugas-tugas utamanya serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas diukur melalui pencapaian tujuan melalui tahapan-tahapan yang telah dirumuskan, mencakup aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. (Annas, 2017)

menguraikan beberapa kriteria pengukuran efektivitas program, yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu: Program yang telah direncanakan harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan, agar hasil yang diinginkan tercapai dan memberikan kepuasan kepada penerima program.
2. Sumber daya manusia: Sumber daya manusia yang mengelola program merupakan faktor penting dalam keberhasilan. Pemilihan individu yang tepat berdasarkan kriteria yang relevan dengan program sangat diperlukan, menekankan prinsip *"the right man on the right job."*
3. Mekanisme kerja: Aturan dan strategi yang digunakan untuk melaksanakan program sangat penting. Jika mekanisme kerja diterapkan dengan baik, tujuan program dapat tercapai secara optimal.
4. Kerjasama dan komunikasi: Hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pelaksana program, serta antara pelaksana dan penerima program, sangat penting untuk mencapai hasil yang diharapkan.
5. Penyaluran dana yang tepat: Pengelolaan dana program harus dilakukan dengan efektif dan efisien agar program berjalan sesuai rencana.
6. Tidak adanya penyimpangan: Pengelolaan program harus bebas dari penyimpangan, terutama dalam menetapkan sasaran program.
7. Monitoring dan evaluasi: Tahap terakhir dalam mengukur efektivitas adalah melalui monitoring dan evaluasi, yang memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.

Dari kriteria yang dikemukakan (Annas, 2017) , efektivitas program diukur berdasarkan ketepatan waktu, kualitas sumber daya manusia, mekanisme kerja, kerjasama dan komunikasi, penyaluran dana yang baik, serta monitoring dan evaluasi. Teori ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian tentang efektivitas suatu program.

Efektivitas pemberdayaan narapidana juga bisa dinilai dari kemampuan serta keyakinan diri mereka dalam menggunakan sumber daya yang tersedia, seperti yang mereka peroleh dari lingkungan sekitarnya. Di tahap berikutnya, efektivitas peningkatan dan pembinaan narapidana juga bisa diukur dari kinerja dan hasil yang tercapai dalam proses pembinaan, seperti peningkatan kemampuan dan keyakinan diri, serta kesadaran dan kekuatan dalam membentuk masa depan mereka sendiri (Nur Azizah Fitriana, 2021). Adanya indikator efektivitas pemberdayaan narapidana dapat membantu untuk menilai sejauh mana efektivitasnya, menurut (Aulia, 2021) ada beberapa indikator untuk menentukan efektivitasnya yaitu:

1. Pemahaman program, narapidana memiliki pemahaman terhadap program pemberdayaan yang mereka terima.
2. Tepat sasaran, pemberdayaan dan pembinaan narapidana berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Tepat waktu, pemberdayaan dan pembinaan narapidana dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Tercapainya tujuan, pemberdayaan dan pembinaan narapidana berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Perubahan, pemberdayaan dan pembinaan narapidana menyebabkan perubahan positif dalam kemandirian dan karakter narapidana.

Bahwasanya efektivitas pemberdayaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan program-program pembinaan yang diterapkan, tetapi juga dengan pengukuran indikator-indikator keberdayaan, standar proses pemberdayaan, dan indikator kinerja Lapas. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang efektif, diperlukan upaya holistik yang melibatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah, peningkatan kapasitas individu, penanganan hambatan, serta partisipasi aktif dalam program pembinaan dan pelatihan keterampilan masyarakat (Jim, 2008: 63). Menurut (Suharto, 2006: 102). Kesuksesan pemberdayaan dapat diukur melalui berbagai indikator,

termasuk tingkat asimilasi, tingkat residivisme, partisipasi dalam program pembinaan, dan perubahan perilaku positif (Andika, 2022). Oleh karena itu, penting bagi Lapas untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan narapidana. Tidak lupa juga dengan memperhatikan indikator kinerja Lapas dalam target-target kinerjanya, seperti halnya yang tercantum dalam (*Rencana Strategis Lapas Kelas I Semarang 2020-2024*, 2024):

1. Proporsi pelayanan pemasyarakatan yang memenuhi standar untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mendukung implementasi sistem pemasyarakatan.
2. Proporsi narapidana dan tahanan yang patuh terhadap hukum untuk meningkatkan persentase program pembinaan guna memperbaiki reintegrasi sosial.
3. Jumlah narapidana yang terlibat dalam pekerjaan atau pelatihan keterampilan selama masa pembinaan dengan tujuan mencapai kemandirian individu.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN & PAPARAN DATA

A. Profil Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang

Lapas Kelas 1 Semarang atau Lapas Kedungpane dulu bernama Lapas Mlaten dan berlokasi di Jalan Dr Cipto Nomor 62, Mlaten, Semarang. Sekarang Lapas Semarang berada di Jalan Raya Semarang-Boja Km 4, Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Lapas tersebut telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Tanggal 13 Maret 1993, Lapas Kelas 1 Semarang mulai beroperasi. Memiliki kapasitas sekitar 663 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), bentuk bangunan Lapas Semarang seperti paviliun. Lapas ini dibangun di atas tanah seluas 4,5 hektar, dengan luas bangunan mencapai 1,3 hektar. Lapas Semarang dibagi dalam 12 blok hunian, dengan masing-masing bloknya terdiri dari 21 kamar yaitu Padepokan Abimanyu, Padepokan Bima, Padepokan Citrawirya, Padepokan Drupada Padepokan Ekalaya, Padepokan Fatruk, Padepokan Gatot Kaca, Padepokan Hanoman, Padepokan Indra, Padepokan Janaka, Padepokan Kresna dan Padepokan Lesmana. Lapas Semarang termasuk Unit Pelaksana Teknis besar di Jawa Tengah yang emiliki kapasitas 663 dengan jumlah penghuni 1.720 atau kelebihan kapasitas 159,43%.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan, berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lapas ini diresmikan pada 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman saat itu, Ismail Saleh, SH. Terletak di Jalan Raya Semarang Boja Km.4, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, gedung ini merupakan hasil pemindahan dari lokasi sebelumnya di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang.

Pemindahan ini dilakukan untuk menyesuaikan lokasi dengan tata ruang Kota Semarang serta mempertimbangkan faktor keamanan dan ketertiban. Hal ini disebabkan oleh kapasitas penghuni yang melebihi

batas serta karena bangunan Lapas Mlaten, yang merupakan peninggalan penjara Belanda, tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pembinaan narapidana sesuai dengan konsep Pemasyarakatan di Indonesia.

1. Adapun bentuk bangunan Lapas Kelas I Semarang dengan tipe Paviliun yang berdiri di atas tanah seluas 54. 636 m2 dengan luas bangunan 13.073 m2 dengan perincian sebagai berikut :
    a. Ruang Kepala
    b. Ruang Kantor berlantai 2
    c. Ruang Aula Serbaguna
    d. Ruang Kunjungan, Pembinaan dan Kemanan
    e. Blok Penghuni terdiri dari 12 Blok (daya tampung 530 orang)
    f. Blok A (padepokan Abimanyu) dan blok B (padepokan Bima) merupakan tempat hunian bagi Narapidana Narkoba
    g. Blok C (padepokan Citrawirya), blok D (padepokan Drupada) dan E (padepokan Ekalaya) merupakan tempat hunian untuk Narapidana umum
    h. Blok F (padepokan Fatruk), blok G (padepokan Gatot Kaca), dan blok H (padepokan hanoman) merupakan tempat hunian tahanan
    i. Blok I (padepokan Indra) merupakan tempat hunian Tahanan Narkoba
    j. Blok J (padepokan Janaka) merupakan tempat hunian kasus tipikor
    k. Blok K (padepokan Kresna) merupakan tempat pengasingan
    l. Blok L (padepokan Lesmana) meruapakan tempat hunian tahanan dengan kasus tipikor
    m. Tempat Ibadah (Masjid, Gereja)
    n. Ruang Poliklinik
    o. Ruang Ketrampilan Kerja
    p. Pos Jaga Atas 7 Unit dan Pos Jaga Bawah 4 Unit
    q. Ruang Dapur dan Gudang
    r. Lapangan Sarana Olah Raga
    s. Rumah Dinas Pegawai

2. Struktur Kepengurusan Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang

Struktur organisasi di Lapas Kedungpane diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011, yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dalam operasionalnya, Lapas Kedungpane dipimpin oleh seorang Kalapas yang didukung oleh staf lainnya. Berikut ini adalah struktur organisasi Lapas Kedungpane:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas 1 Semarang

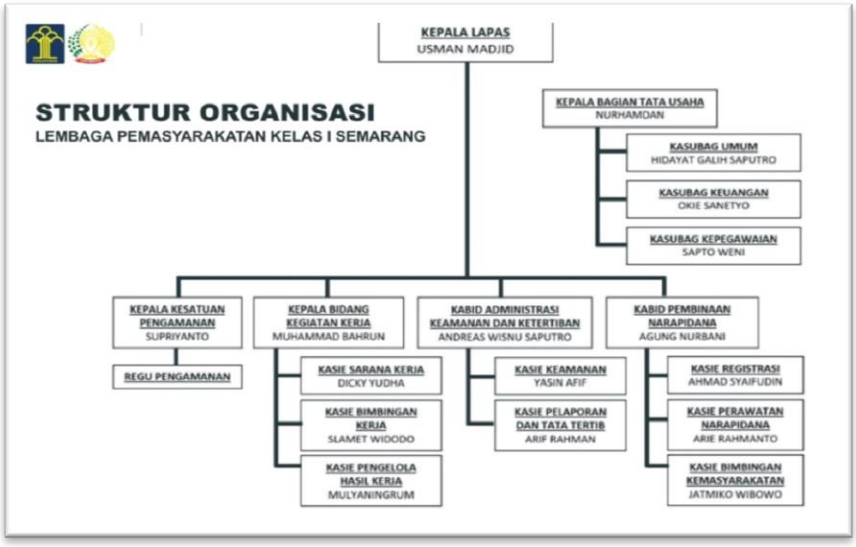

(Sumber: Dokumen Lapas Kelas 1 Semarang)

3. Visi Misi, Tata Nilai dan Motto Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang

Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas

3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

4. Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**"

1. Profesional: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergitas: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
4. Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Integritas: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

5. Motto

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu "**B E R T E M A N**". (Bersih, Tertib, Aman, Nyaman)

6. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang

A. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas

melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. melakukan urusan kepegawaian;
b. melakukan urusan keuangan;
c. melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

B. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Sub Bagian Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum.

C. Surb Bagian Kerpergawaian mermpurnyai turgas merlakurkan urrursan kerpergawaian.

D. Surb Bagian Kerurangan mermpurnyai turgas merlakurkan urrursan kerurangan

E. Surb Bagian Urmurm mermpurnyai turgas merlakurkan urrursan surrat-mernyurrat, perrlerngkapan dan rurmah tangga

F. Bidang Permbinaan Narapidana mermpurnyai turgas merlaksanakan permbinaan permasyarakatan narapidana.

G.

H. Bidang Permbinaan Narapidana mermpunyai fungsi:

a. melakukan regristrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
b. memberikan bimbingan pemasyarakatan;
c. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

I. Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari :
   a. Seksi Regristrasi;
   b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan;
   c. Seksi Perawatan Narapidana.

J. Serksi Rergristrasi mermpurnyai turgas merlakurkan perncatatan dan mermburat statistik serrta dokurmerntasi sidik jari narapidana.

K. Serksi Bimbingan Kermasyarakatan mermpurnyai turgas mermberrikan bimbingan dan pernyurlurhan rohani serrta mermberrikan latihan olah raga, perningkatan perngertahuran, asimilasi, curti dan pernglerpasan narapidana.

L. Serksi Perrawatan Narapidana mermpurnyai turgas merngurrurs kerserhatan dan mermberrikan perrawatan narapidana.

M. Bidang Kergiatan Kerrja mermpurnyai turgas mermberrikan bimbingan kerrja, mermperrsiapkan sarana kerrja dan merngerlola hasil kerrja.

N. Bidang Kergiatan Kerrja mermpurnyai turgas :
   a. memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
   b. mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
   c. mengelola hasil kerja.

O. Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:
   a. Seksi Bimbingan Kerja;
   b. Seksi Sarana Kerja;
   c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja.

P. Serksi Bimbingan Kerrja mermpurnyai turgas mermberrikan perturnjurk dan bimbingan latihan kerrja bagi narapidana.

Q. Serksi Sarana Kerrja mermpurnyai turgas mermperrsiapkan fasilitas sarana kerrja.

R. Serksi Perngerlolaan Hasil Kerrja mermpurnyai turgas merngerlola hasil kerrja.

S. Bidang Administrasi Keramanan dan Tata Terrtib mermpurnyai turgas merngaturr jadwal turgas, pernggurnaan perrlerngkapan dan permbagian turgas perngamanan, mernerrima laporan harian dan berrita acara dari saturan perngamanan yang berrturgas serrta mernyursurn laporan berrkala dibidang keramanan dan mernergakkan tata terrtib.

T. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas:
   a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
   b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

U. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:
   a. Seksi Keamanan;
   b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

V. Serksi Keramanan mermpurnyai turgas merngaturr jadwal turgas, pernggurnaan perrlerngkapan dan permbagian turgas perngamanan.

W. Serksi Perlaporan dan Tata Terrtib mermpurnyai turgas mernerrima laporan harian dan berrita acara dari saturan perngamanan yang berrturgas serrta mermperrsiapkan laporan berrkala dibidang keramanan dan mernergakkan tata terrtib.

X. Kersaturan Perngamanan LAPAS mermpurnyai turgas mernjaga keramanan dan kerterrtiban LAPAS.

Y. Kersaturan Perngamanan LAPAS mempunyai fungsi;
   a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana;
   b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
   c. melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
   d. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Berikut adalah kondisi demografis dari Lembaga Permasyarakatan Kelas1 Semarang.

Z. Kondisi Demografi

Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 23 Agustus 2024

Table 1.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 23 Agustus 2024

NO.	**LAMA PIDANA**	**NARAPIDANA**				**JUMLAH**
		ANAK	**PMD**	**DWSA**	**ASING**	
1	B I	0	15	1122	10	1147
2	B II a	0	3	1	0	4
3	B II b	0	0	0	0	0
4	B III	0	0	26	0	26
5	SH	0	0	22	1	23
6	PM	0	0	8	1	9
JUMLAH		**0**	**18**	**1179**	**12**	**1209**

(Sumber data : Regristasi Lapas Kelas 1 Semarang)

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dapat dilihat bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 jumlah WBP Melalui data yang disajikan dalam tabel menunjukan bahwa banyaknya WBP di Lapas Kedungpane berdasarkan lamanya masa pidana dikategorikan menjadi 6 macam, yaitu masa pidana diatas 1 tahun lebih 1 hari sampai 20 tahun (B I), 3 bulan 1 hari sampai 1 tahun (B II a), 1 hari sampai 3 bulan (B II b), pidana pengganti uang denda (B III), seumur hidup (SH), pidana mati (PM).

Posisi pertama diduduki oleh masa pidana diatas 1 Tahun dengan jumlah sebanyak 1147 Orang, posisi kedua dengan masa pidana

pengganti uang denda 26 Orang, selanjutnya masa pidana seumur hidup 23 orang, disusul oleh masa pidana pidana mati yaitu 9 orang, lebih dari 3 bulan 4 Orang, dan lebih dari 1 hari tidak ada narapidana.

Table 2.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 24 Agustus 2024

NO.	**LAMA PIDANA**	**NARAPIDANA**				**JUMLAH**
		ANAK	**PMD**	**DWSA**	**ASING**	
1	B I	0	15	1121	10	1146
2	B II a	0	3	1	0	3
3	B II b	0	0	0	0	0
4	B III	0	0	26	0	26
5	SH	0	0	22	1	23
6	PM	0	0	8	1	9
JUMLAH		**0**	**18**	**1177**	**12**	**1207**

(Sumber data : Regristasi Lapas Kelas 1 Semarang)

Posisi pertama diduduki oleh masa pidana diatas 1 Tahun dengan jumlah sebanyak 1146 Orang, posisi kedua dengan masa pidana pengganti uang denda 26 Orang, selanjutnya masa pidana seumur hidup 23 orang, disusul oleh masa pidana pidana mati yaitu 9 orang, lebih dari 3 bulan 3 Orang, dan lebih dari 1 hari tidak ada narapidana.

Table 3.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 25-26 Agustus 2024

NO.	**LAMA PIDANA**	**NARAPIDANA**				**JUMLAH**
		ANAK	**PMD**	**DWSA**	**ASING**	
1	B I	0	15	1114	10	1139
2	B II a	0	3	0	0	3

3	B II b	0	0	0	0	0
4	B III	0	0	26	0	26
5	SH	0	0	22	1	23
6	PM	0	0	8	1	9
JUMLAH		**0**	**18**	**1170**	**12**	**1200**

(Sumber data : Regristasi Lapas Kelas 1 Semarang)

Posisi pertama diduduki oleh masa pidana diatas 1 Tahun dengan jumlah sebanyak 1139 Orang, posisi kedua dengan masa pidana pengganti uang denda 26 Orang, selanjutnya masa pidana seumur hidup 23 orang, disusul oleh masa pidana pidana mati yaitu 9 orang, lebih dari 3 bulan 3 Orang, dan lebih dari 1 hari tidak ada narapidana. Jadi di tanggal 25-26 Agustus 2024 tidak ada perubahan data.

Table 4.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 27 Agustus 2024

NO.	**LAMA PIDANA**	**NARAPIDANA**				**JUMLAH**
		ANAK	**PMD**	**DWSA**	**ASING**	
1	B I	0	15	1114	10	1138
2	B II a	0	3	0	0	3
3	B II b	0	0	0	0	0
4	B III	0	0	26	0	26
5	SH	0	0	22	1	23
6	PM	0	0	8	1	9
JUMLAH		**0**	**18**	**1170**	**12**	**1199**

(Sumber data : Regristasi Lapas Kelas 1 Semarang)

Posisi pertama diduduki oleh masa pidana diatas 1 Tahun dengan jumlah sebanyak 1138 Orang, posisi kedua dengan masa pidana pengganti uang denda 26 Orang, selanjutnya masa pidana seumur

hidup 23 orang, disusul oleh masa pidana pidana mati yaitu 9 orang, lebih dari 3 bulan 3 Orang, dan lebih dari 1 hari tidak ada narapidana.

Table 5.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 28 Agustus 2024

NO.	**LAMA PIDANA**	**NARAPIDANA**				**JUMLAH**
		ANAK	**PMD**	**DWSA**	**ASING**	
1	B I	0	15	1114	10	1136
2	B II a	0	3	0	0	3
3	B II b	0	0	0	0	0
4	B III	0	0	26	0	26
5	SH	0	0	22	1	23
6	PM	0	0	8	1	9
JUMLAH		0	18	1170	12	1197

(Sumber data : Regristasi Lapas Kelas 1 Semarang)

Posisi pertama diduduki oleh masa pidana diatas 1 Tahun dengan jumlah sebanyak 1136 Orang, posisi kedua dengan masa pidana pengganti uang denda 26 Orang, selanjutnya masa pidana seumur hidup 23 orang, disusul oleh masa pidana pidana mati yaitu 9 orang, lebih dari 3 bulan 3 Orang, dan lebih dari 1 hari tidak ada narapidana.

Table 6.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Lama Pidana di Tanggal 29 Agustus 2024

NO.	**LAMA PIDANA**	**NARAPIDANA**				**JUMLAH**
		ANAK	**PMD**	**DWSA**	**ASING**	
1	B I	0	15	1114	10	1139
2	B II a	0	3	0	0	3
3	B II b	0	0	0	0	0

4	B III	0	0	26	0	26
5	SH	0	0	22	1	23
6	PM	0	0	8	1	9
JUMLAH		**0**	**18**	**1170**	**12**	**1200**

(Sumber data : Regristasi Lapas Kelas 1 Semarang)

Posisi pertama diduduki oleh masa pidana diatas 1 Tahun dengan jumlah sebanyak 1139 Orang, posisi kedua dengan masa pidana pengganti uang denda 26 Orang, selanjutnya masa pidana seumur hidup 23 orang, disusul oleh masa pidana pidana mati yaitu 9 orang, lebih dari 3 bulan 3 Orang, dan lebih dari 1 hari tidak ada narapidana.

Jadi kesimpulan dari 6 tabel adalah dalam jangka satu minggu, data tentang narapidana yang masuk di Lapas Kelas 1 Semarang cenderung mengalami perubahan setiap harinya. Setelah dianalisis, terjadi penurunan jumlah narapidana selama periode 23-29 Agustus 2024. Oleh karena itu, data rekapan tahunan yang lengkap untuk Lapas ini masih belum tersedia.

Table 7.1 Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang Masuk Lapas Berdasarkan Kasus Kejahatan di Tanggal 23 Agustus 2024

NO	**KASUS**	**TANGGAL**					
		23	24	25,26	27	28	29
1.	Korupsi	68	68	68	68	68	68
2	Teroris	5	5	5	5	5	5
3	Narkoba	716	715	716	715	715	716
4	TPPU	3	0	3	3	3	3
5	Perdagangan Manusia	0	0	0	0	0	0
6	Pembalakan Hutan	3	3	3	3	3	3

7	Pidum	319	318	310	310	308	310

(Sumber data : Regristasi Lapas Kelas 1 Semarang)

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel dapat dilihat bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 jumlah WBP dengan kasus kejahatan yang menduduki posisi paling atas merupakan kasus narkoba yaitu sebanyak 716 Orang, posisi selanjutnya yaitu kasus pidana umum (pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, penggelapan, penipuan, perjudian) yaitu sebanyak 319 Orang, diikuti oleh kasus korupsi berjumlah 68 Orang, teroris 5 orang, TPPU (Tindakan Pidana Pencucian Uang) 3 orang, pembalakan hutan 3 orang dan perdagangan manusia tidak ada orang.

Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2024 jumlah WBP dengan kasus kejahatan yang menduduki posisi paling atas merupakan kasus narkoba yaitu sebanyak 715 Orang, posisi selanjutnya yaitu kasus pidana umum (pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, penggelapan, penipuan, perjudian) yaitu sebanyak 318 Orang, diikuti oleh kasus korupsi berjumlah 68 Orang, teroris 5 orang, TPPU (Tindakan Pidana Pencucian Uang) tidak ada orang, pembalakan hutan 3 orang dan perdagangan manusia tidak ada orang.

Selanjutnya pada tanggal 25-26 Agustus 2024 jumlah WBP dengan kasus kejahatan yang menduduki posisi paling atas merupakan kasus narkoba yaitu sebanyak 716 Orang, posisi selanjutnya yaitu kasus pidana umum (pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, penggelapan, penipuan, perjudian) yaitu sebanyak 310 Orang, diikuti oleh kasus korupsi berjumlah 68 Orang, teroris 5 orang, TPPU (Tindakan Pidana Pencucian Uang) 3 orang, pembalakan hutan 3 orang dan perdagangan manusia tidak ada orang.

Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2024 jumlah WBP dengan kasus kejahatan yang menduduki posisi paling atas merupakan kasus narkoba yaitu sebanyak 715 Orang, posisi selanjutnya yaitu kasus pidana umum (pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, penggelapan, penipuan, perjudian) yaitu sebanyak 310 Orang, diikuti oleh kasus korupsi berjumlah 68 Orang, teroris 5 orang, TPPU (Tindakan Pidana Pencucian Uang) tidak ada orang, pembalakan hutan 3 orang dan perdagangan manusia tidak ada orang.

Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2024 jumlah WBP dengan kasus kejahatan yang menduduki posisi paling atas merupakan kasus narkoba yaitu sebanyak 715 Orang, posisi selanjutnya yaitu kasus pidana umum (pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, penggelapan, penipuan, perjudian) yaitu sebanyak 308 Orang, diikuti oleh kasus korupsi berjumlah 68 Orang, teroris 5 orang, TPPU (Tindakan Pidana Pencucian Uang) 3 orang, pembalakan hutan 3 orang dan perdagangan manusia tidak ada orang.

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2024 jumlah WBP dengan kasus kejahatan yang menduduki posisi paling atas merupakan kasus narkoba yaitu sebanyak 716 Orang, posisi selanjutnya yaitu kasus pidana umum (pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, penggelapan, penipuan, perjudian) yaitu sebanyak 310 Orang, diikuti oleh kasus korupsi berjumlah 68 Orang, teroris 5 orang, TPPU (Tindakan Pidana Pencucian Uang) 3 orang, pembalakan hutan 3 orang dan perdagangan manusia tidak ada orang.

B. Program Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas 1 Semarang Sebagai Upaya Pemberdayaan Narapidana

Pemberdayaan dilakukan terhadap pihak yang kurang berdaya. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap narapidana didasarkan sebagai pihak yang tidak berdaya, kebebasan yang dibatasi dan terasingkan

dalam kehidupan masyarakat yang berada di lembaga pemasyarakatan. Pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah kegiatan berkelanjutan yang berlangsung selama manusia terus berupaya melakukan perubahan dan perbaikan, tanpa terbatas pada satu program saja. Pemberdayaan ini merupakan proses yang berjalan seiring dengan kehidupan manusia, diperoleh dari pengalaman individu, dan tidak berhenti pada suatu titik waktu tertentu. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan narapidana yang memiliki keterampilan setelah mereka dibebaskan. Harapannya, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat menjalani kehidupan mereka dan diterima oleh masyarakat, serta tidak kembali melakukan tindakan kriminal.

Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan dengan tetap menghormati nilai-nilai masyarakat dan lingkungan, perlakuan terhadap narapidana tidak boleh dilakukan sembarangan. Perlakuan yang diberikan bertujuan untuk memanusiakan kembali narapidana melalui program pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar siap kembali ke masyarakat. Pembinaan juga biasanya diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, dan terencana oleh pembina, dengan tujuan mengubah, memperbarui, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku binaan. Proses ini dilakukan melalui tindakan yang diarahkan, dibimbing, distimulasi, dan diawasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku untuk mencapai tujuan akhir yaitu pembangunan manusia secara utuh. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan diri dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada lewat pembinaan ini.

> *"Pembinaan ini penting mbak,, karena masih ada stigma negatif di masyarakat terhadap narapidana yang telah menyelesaikan hukumannya, yang dapat menjadi hambatan bagi mereka saat berusaha kembali berintegrasi dalam masyarakat. Stigma negatif seringkali melekat pada narapidana, meskipun mereka sebenarnya memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, muncul karena mereka tidak diberi kesempatan dan sudah terlanjur dianggap buruk oleh masyarakat. Pandangan seperti ini dapat menghambat proses resosialisasi narapidana di tengah masyarakat,*

bahkan bisa mendorong mereka kembali ke kebiasaan lama yang merugikan. Hal ini juga akan mengganggu proses pembangunan. Namun, jika masyarakat mau menerima mereka, narapidana akan lebih mudah mengembangkan potensi yang telah mereka peroleh selama pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan begitu, hasil dari pembinaan ini bisa menjadi bekal berharga dalam kehidupan sosial mereka setelah bebas." (wawancara dengan bapak Burhan selaku Kabid Giatja Lapas Kelas 1 Semarang)

Berdasarkan wawancara tersebut menekankan pentingnya program pembinaan di Lapas Kelas 1 Semarang sebagai upaya untuk membantu narapidana mengatasi stigma negatif yang masih ada di masyarakat. Stigma tersebut sering kali menjadi penghalang bagi narapidana yang telah menyelesaikan hukumannya saat mereka berusaha untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan kata lain, meskipun mereka telah menjalani hukuman, pandangan negatif dari masyarakat dapat menghambat upaya mereka untuk memulai hidup baru.

Disisi lain narapidana di Lapas Kelas 1 Semarang wajib mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lembaga tersebut. Kewajiban ini secara langsung membatasi kebebasan mereka selama berada di dalam lapas. Pembatasan tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembinaan. Tujuan utamanya adalah mendisiplinkan narapidana dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik, sehingga mereka dapat berintegrasi secara positif di kemudian hari.

"Narapidana harus mengikuti semua peraturan dan kebijakan yang terdapat di Lapas kelas 1 Semarang, sehingga hal inilah yang membatasi aspek kebebasan narapidana. Selain itu, juga digaris bawahi bahwa narapidana di Lapas Kelas 1 Semarang harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lapas. Kewajiban ini membatasi aspek kebebasan narapidana selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembatasan ini merupakan bagian dari proses pembinaan yang bertujuan untuk mendisiplinkan mereka dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik."(wawancara dengan bapak Nanda, staff bimker)

Pembinaan Kemandirian Narapidana merupakan program asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana setelah mereka menjalani setengah dari masa hukuman. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kerja, sehingga narapidana dapat menjadi lebih mandiri. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan komunikasi yang baik antara petugas lapas dan narapidana sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini. Proses pemberdayaan narapidana melalui pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan narapidana agar mereka dapat mandiri setelah bebas. Berdasarkan 10 prinsip dalam Pemasyarakatan, Lapas Kelas 1 Semarang menjalankan program pembinaan yang terbagi menjadi dua kategori sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ridwan, Kasubag Lapas..

> *"Di Lapas Kedungpane, pembinaan dibagi menjadi dua, yaitu Pembinaan Kepribadian (Pembinaan kepribadian merupakan bagian dari pembinaan yang terdapat di Lapas kedungpane, sebagaimana dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan yaitu pembinaan ditujukan dan diarahkan untuk mengembalikan keadaan rohani Warga Binaan yang pernah hilang agar memiliki pandangan hidup dan keyakinan yang lebih baik) dan Pembinaan Kemandirian (pembinaan kemandirian dilakukan sebagai upaya membantu Warga Binaan melalui berbagai macam keterampilan. Dengan memberikan keterampilan harapannya dapat berguna sebagai bekal setelah Warga Binaan bebas dari Lapas. Orang yang pernah melakukan tindakan menyimpang hingga dipidana akan sulit mencari pekerjaan oleh karena itu adanya keterampilan yang dimiliki dapat digunakan untuk mencari pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri... Jadi di setiap pembinaan nanti ada prosedur tersendiri mbak." (wawancara dengan bapak Hamdan, Kasubag Lapas Kelas 1 Semarang)*

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lapas Kedungpane memiliki program pembinaan yang terdiri dari dua jenis, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan

kepribadian ini merupakan salah satu program utama dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter, mental, serta spiritual narapidana agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa hukuman berakhir. Pembinaan kepribadian di Lapas Kelas 1 Semarang merupakan salah satu aspek penting dari program pembinaan, dengan tujuan utama memulihkan kondisi rohani Warga Binaan. Pembinaan ini diarahkan untuk membangun kembali pandangan hidup dan keyakinan yang lebih baik bagi mereka. Melalui proses ini, diharapkan Warga Binaan dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menyadari kesalahan yang pernah dilakukan, serta berkomitmen untuk tidak mengulanginya dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Upaya untuk membangkitkan pemahaman dan sikap proaktif dari narapidana terhadap perubahan positif dalam hidup mereka. Proses ini melibatkan strategi pembinaan yang tidak hanya memfokuskan pada penegakan disiplin dan aturan, tetapi juga mengajak narapidana untuk menyadari pentingnya memperbaiki diri dan merubah perilaku buruk yang mungkin pernah dilakukan. Upaya ini dilakukan dengan berbagai metode, seperti pendidikan karakter, program keagamaan, dan konseling, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan kesadaran diri narapidana. Tujuan akhirnya adalah agar narapidana memahami kesalahan masa lalu mereka dan menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk memperbaiki diri serta berkontribusi kepada masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Dengan kesadaran ini, narapidana tidak hanya akan lebih mudah menjalani proses rehabilitasi, tetapi juga akan siap menghadapi tantangan setelah mereka kembali ke masyarakat. Kesadaran diri ini meliputi pengakuan akan kesalahan, tanggung jawab untuk memperbaiki diri, serta semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Selanjutnya ada pembinaan kemandirian ini merupakan program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan

kemampuan narapidana agar mereka dapat mandiri setelah menyelesaikan masa hukuman. Program ini dirancang untuk memberi bekal kepada narapidana dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja. Dengan memberikan keterampilan harapannya dapat berguna sebagai bekal setelah Warga Binaan bebas dari Lapas. Tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan setelah menjalani hukuman. Masyarakat seringkali memandang negatif mantan narapidana karena sejarah mereka yang pernah melakukan tindakan kriminal atau menyimpang. Stigma ini mengakibatkan kesulitan bagi mereka untuk diterima kembali di lingkungan kerja atau masyarakat. Perusahaan, instansi, atau pemberi kerja biasanya ragu atau enggan mempekerjakan mantan narapidana karena kekhawatiran terkait potensi masalah atau kepercayaan terhadap perilaku mereka. Ini menciptakan penghalang yang signifikan dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Namun, keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi kunci bagi mantan narapidana untuk mengatasi tantangan ini.

Berikut adalah struktur organisasi dalam progam pembinaan kemandirian Lapas Kelas 1 Semarang.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidang Giatja

(Sumber: Dokumentasi Petugas Lapas)

Pembinan narapidana dilakukan berdasarkan pola yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pola dan materi pembinaannya meliputi: a. Pembinaan Kepribadian, yang mencakup kegiatan seperti: 1) Pembinaan kesadaran beragama 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara 3) Pengembangan intelektual melalui pendidikan formal dan nonformal dan 4) Pembinaan integrasi dengan masyarakat. b. Pembinaan Kemandirian, yang mencakup kegiatan seperti: 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri; 2) Keterampilan di bidang perkebunan; dan 3) Pelatihan di sektor industri. Program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Kelas 1 Semarang meliputi pelatihan penjahitan, batik, kerupuk, kaligrafi, perikanan (nila, lele), mendoan, bakery, eceng gondok, potong rambut, laundry, es batu, las kayu, rotan sintesis, pertanian, sablon, kerajinan (handycraft) dan kebersihan. Dari sini kita dapat menggolong jadi 5 jenis yaitu :

1. Pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri
    a. Menjahit
    b. Pembuatan batik
    c. Pembuatan kerupuk
    d. Pembuatan bakery
    e. Sablon
    f. Keterampilan handycraft
    g. Kaligrafi
    h. Potong rambut
    i. Laundry
    j. Pembuatan es batu
2. Keterampilan di bidang perkebunan
    a. Anyaman eceng gondok
    b. Pertanian
3. Pelatihan di sektor industri
    a. Perikanan (nila, lele)

b. Pembuatan mebel (las kayu)
c. Rotan sintetis
d. Las besi
e. Kebersihan

Pelatihan ini membantu mengembangkan keterampilan mereka selama di lapas.Pelatihan ini bertujuan untuk membekali narapidana dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mereka manfaatkan setelah keluar dari lapas. Keterampilan kerja akan memberikan narapidana kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik dan mengurangi risiko mereka kembali melakukan tindak kriminal (residivisme). Selain itu, selama narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka memperoleh premi dari hasil karya yang berhasil dijual, yang dapat mendorong semangat mereka untuk terus bekerja. Hal ini menekankan pentingnya pengembangan narapidana dalam program pembinaan.

Selain meningkatkan potensi, program ini juga membantu narapidana mengasah bakat dan minat yang dimiliki, sehingga dapat lebih siap untuk menghadapi kehidupan setelah keluar dari lapas dan berkontribusi positif di masyarakat. Ketika mereka mampu memperoleh penghasilan secara mandiri melalui keterampilan yang dikuasai, mereka akan lebih percaya diri dan merasa dihargai oleh masyarakat. Hal ini juga mengurangi tekanan ekonomi yang dapat menjadi salah satu faktor pemicu kembali ke tindakan kriminal. Dalam hal ini Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Semarang hadir sebagai pelaku dalam program pembinaan kemandirian. Berikut adalah data warga binaan yang mengikuti progam pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang (Lampiran).

Bagi narapidana yang ingin berpartisipasi dalam program ini, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui. Proses pendaftaran dilakukan dengan transparan dan sistematis, mulai dari pengisian formulir hingga penilaian kualifikasi. Setiap narapidana akan melalui proses seleksi

yang didasarkan pada minat, kemampuan, dan kesiapan mereka untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Melalui pembinaan ini, diharapkan narapidana tidak hanya mampu menjalani masa tahanan dengan lebih produktif, tetapi juga dapat mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Penjelasan berikut akan menguraikan secara detail langkah-langkah yang harus diikuti oleh narapidana untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam program ini.

1. Pendaftaran Program Pembinaan Kemandirian

   Tahap pertama dimulai dengan warga binaan Permasyaraktan yang mengajukan diri untuk mengikuti program pembinaan kerja.

   > *"Tahap pertama ini dimulai dengan warga binaan yang mengajukan diri untuk mengikuti program pembinaan kerja. Mereka biasanya menyampaikan minat dan motivasi mereka kepada petugas yang bertanggung jawab atas program ini. Setelah itu, kami melakukan seleksi awal untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti perilaku selama masa tahanan, minat terhadap bidang tertentu, dan kesiapan mental. Seleksi ini penting untuk memastikan bahwa warga binaan yang terpilih benar-benar siap dan akan mendapatkan manfaat maksimal dari program pembinaan ini." (wawancara dengan bapak firman, staf bimker)*

2. Pengisian Data Administrasi

   Pada tahap ini Warga Binaan Permasyarakatan harus mengisi data administrasi.

   > *"Setelah lolos seleksi awal, warga binaan kemudian harus mengisi data administrasi yang diperlukan untuk mengikuti program ini. Data administrasi ini mencakup informasi pribadi, riwayat hukum, dan minat kerja mereka. Pengisian data ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga binaan terdaftar dengan benar dan dapat diikutsertakan dalam program pembinaan yang sesuai dengan profil dan kebutuhan mereka."(wawancara dengan bapak firman, staff bimker)*

3. Assesment Pekerja (Warga Binaan Permasyarakatan) Oleh Petugas Bimker

   Tahap selanjutnya adalah assessment atau penilaian terhadap calon pekerja yang dilakukan oleh petugas bimbingan kerja (BIMKER).

Penilaian ini bertujuan untuk memahami potensi dan kesiapan warga binaan.

Gambar 3.1 Assesment Calon Peserta Program Pembinaan Kemandirian

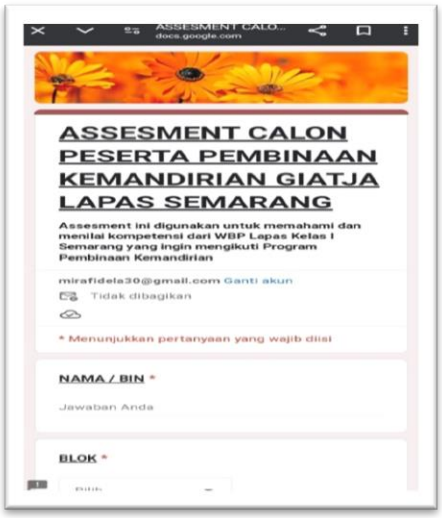

(Sumber: Dokumentasi Petugas Lapas)

"Tahap selanjutnya adalah assessment atau penilaian terhadap calon pekerja yang dilakukan oleh petugas bimbingan kerja (BIMKER). Jadi nanti WBP mengisi link assesment ini didampingi oleh petigas lapas mbak. Penilaian ini bertujuan untuk memahami potensi dan kesiapan warga binaan. Melalui assessment ini, kami bisa menentukan bidang kerja yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, serta memastikan bahwa mereka memiliki kesiapan mental dan fisik untuk mengikuti program pembinaan dengan baik. Nah point dari link assesment itu ada nama, blok, kamar, alamat asal dan domisili, perkara, vonis, pekerjaan, pendidikan, keterampilan saat di luar, keterampilan yang dapat diikuti di bidang kegiatan kerja, asessor. " ."(wawancara dengan bapak firman, staff bimker)

4. Pengarahan Sesuai Minat Bakat

   Berdasarkan hasil assessment, warga binaan akan diarahkan untuk mengikuti program pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

   "Berdasarkan hasil assessment, warga binaan akan diarahkan untuk mengikuti program pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hasil penilaian ini membantu

kami menempatkan mereka di program yang paling cocok, sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan dengan lebih efektif dan merasa lebih termotivasi. Tujuannya adalah agar mereka bisa memperoleh pengalaman dan kemampuan yang dapat mereka manfaatkan setelah kembali ke masyarakat.". (wawancara dengan bapak firman, staff bimker)

5. Pelatihan Kerja

   Warga binaan kemudian mengikuti pelatihan kerja sebagai bagian dari pembinaan kemandirian.

   Gambar 4.1 Pelatihan di Unit Bakery

(Sumber: Dokumentasi Petugas Lapas)

"Setelah diarahkan ke program yang sesuai, warga binaan kemudian mengikuti pelatihan kerja sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Pelatihan ini dirancang untuk membekali mereka dengan keterampilan praktis dan pengetahuan yang dapat mereka gunakan di dunia kerja nantinya. Melalui pelatihan ini, kami berharap mereka bisa lebih siap menghadapi tantangan di luar lapas dan mampu berkontribusi positif di lingkungan mereka setelah bebas." ."(wawancara dengan bapak firman, staff bimker)

6. Sidang TPP Peserta Bimbingan Kerja

Setelah menjalani pelatihan, peserta akan mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menilai hasil dari pelatihan tersebut dan kesiapan warga binaan untuk bekerja.

> *“Setelah menjalani pelatihan, peserta akan mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menilai hasil dari pelatihan tersebut dan kesiapan warga binaan untuk bekerja. Sidang TPP ini merupakan langkah evaluasi di mana kami melihat sejauh mana keterampilan yang telah mereka peroleh, serta kesiapan mereka untuk diterjunkan ke dunia kerja. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa mereka benar-benar siap dan mampu memanfaatkan pelatihan yang telah diberikan. Sidang TPP juga untuk menerbitkan SK agar resmi bisa bekerja.*

7. Warga Binaan siap bekerja

   Warga binaan yang telah melalui semua tahapan ini dinyatakan siap untuk bekerja, baik di dalam lapas maupun setelah bebas.

> *"Warga binaan yang telah melalui semua tahapan ini dinyatakan siap untuk bekerja, baik di dalam lapas maupun setelah bebas. Mereka telah dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, serta dinilai siap secara mental dan fisik untuk bekerja. Dengan kesiapan ini, kami berharap mereka bisa memanfaatkan kesempatan kerja yang ada, baik selama masa pembinaan di dalam lapas maupun setelah mereka kembali ke masyarakat.*

Gambar 5.1 Rotan

Gambar 6.1 Kaligrafi

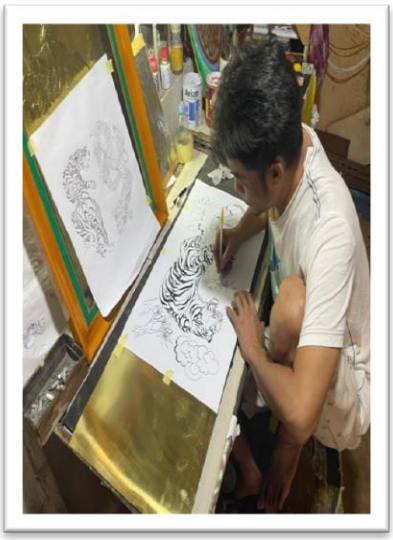

(Sumber Dokumentasi Petugas Lapas)

BAB IV
ANALISIS DATA

A. Analisis Proses Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang

Pemberdayaan bukanlah sekedar pemberian, melainkan sebuah proses pembelajaran yang mengembangkan pola pikir pribadi. Ini merupakan peralihan dari perasaan ketidakberdayaan menuju kehidupan yang aktif dan mandiri, dengan fokus pada pembangunan kemampuan untuk mengambil tindakan dan inisiatif dalam lingkungan serta masa depan. Selain itu, pemberdayaan juga melibatkan pembentukan rasa kebersamaan di antara individu, yang memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk kerja sama dan kekuatan kolektif. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, baik material maupun spiritual, individu dapat mengarahkan diri mereka menuju kehidupan yang lebih berdaya dan sejahtera (Sadan, 2004).

Pemberdayaan juga merupakan proses yang bertujuan agar setiap individu memiliki kekuatan yang cukup untuk berperan serta dalam pengendalian dan memengaruhi berbagai peristiwa serta lembaga yang memengaruhi kehidupannya (Sururi, 2015). Menurut Parson dalam (Totok et al., 2013) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan diperlukan sebagai upaya untuk memberikan ilmu baru kepada orang yang diberdayakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberdayaan dilakukan kepada mereka yang kurang berdaya. Pemberdayaan narapidana didasarkan pada posisi mereka sebagai individu yang tidak berdaya, dengan kebebasan yang terbatas dan terisolasi dari kehidupan masyarakat di dalam institusi

total, yaitu lembaga pemasyarakatan. Narapidana harus mematuhi semua aturan dan kebijakan yang berlaku di Lapas, yang pada akhirnya membatasi kebebasan mereka. Pemberdayaan narapidana melalui pengembangan potensi kemandirian difokuskan pada aspek ekonomi. Pengembangan potensi ekonomi bagi narapidana perlu dilakukan agar nantinya dapat menjadi bekal saat mereka keluar dari Lapas (Ababil, 2020). Tujuan dari upaya ini adalah agar narapidana, setelah kembali ke masyarakat, memiliki kemampuan untuk bersaing dengan masyarakat umum dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Proses pemberdayaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang merupakan langkah strategis dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Melalui program pembinaan kemandirian, lembaga ini bertujuan untuk membekali para warga binaan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari setelah menyelesaikan masa pidana. Analisis ini akan mengeksplorasi berbagai tahapan pemberdayaan yang diterapkan, mulai dari identifikasi potensi hingga pelaksanaan pelatihan kemandirian, serta dampaknya terhadap kesiapan warga binaan dalam menghadapi tantangan hidup di luar lingkungan lapas.

Berikut tahapan proses pemberdayaan masyarakat melalui program pembinaan kemandirian pada lembaga permasyarakat kelas 1 Semarang, yaitu:

1. Tahapan Pemaparan Masalah

   Pada tahap awal ini dilakukan identifikasi masalah, sebelum lapas kelas 1 semarang melaksanakan program pembinaan kemandirian perlu adanya identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh narapidana terkait kemandirian mereka, seperti kurangnya keterampilan dan rendahnya motivasi.

   "Jadi gini mbak, sebagian narapidana itu ada yang kurang termotivasi untuk mengikuti program pembinaan kemandirian. Biasanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran. Jadi biasalah

> *mbak ada yang gampang diatur dan susah diatur untuk mengikuti program keterampilan tersebut. Tapi dari kami tetap mengusahakan agar seluruh WBP mengikuti program keterampilan dengan baik." (wawancara dengan bapak Nanda, staff bimker pembinaan kemandirian)*

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjelaskan bahwa ada narapidana yang kurang termotivasi untuk mengikuti program pembinaan kemandirian di Lapas. Hal ini sering kali terjadi karena beberapa narapidana tidak sepenuhnya menyadari pentingnya program tersebut bagi masa depan mereka. Selain itu, perilaku narapidana juga beragam; ada yang mudah diatur dan kooperatif dalam mengikuti program, sementara ada juga yang sulit diajak untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengelola narapidana dengan sikap dan respons yang berbeda-beda terhadap program keterampilan yang disediakan.

Tetapi bukan hal itu saja, juga terdapat permasalahan terkait hal keterbatasan waktu masa hukuman yang berbeda-beda membuat program kemandirian harus disesuaikan dengan durasi yang tersedia bagi setiap narapidana. Waktu yang terbatas bisa menyulitkan dalam memberikan pelatihan yang cukup komprehensif. Seperti yang dikatakan bapak Firman selaku staff bimker.

> *"biasanya untuk keterbatasan waktu WBP dalam melaksanakan progam itu memang karena singkatnya waktu vonisnya mbak, nah yang lebih penting itu kita sudah memberikan dasaran-dasaran ilmu tentang keterampilan tersebut, jadi nanti bisa diterapkan mereka setelah bebas"(wawancara dengan bapak Firman selaku staff bimker progam pembinaan kemandirian Lapas Kelas 1 Semarang)*

Masalah ini menjadi signifikan karena keterbatasan waktu membuat sulit bagi petugas untuk memberikan pelatihan yang komprehensif dan mendalam kepada narapidana. Akibatnya, narapidana dengan hukuman yang lebih singkat mungkin tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk benar-benar

mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri setelah mereka dibebaskan.

2. Tahap Analisis Masalah

Pada tahap kedua ini adanya analisis masalah setelah diselesaikan pemaparan masalahnya. Ditemukan dua inti dari permasalahan yang dihadapi warga binaan diantaranya kurangnya motivasi dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Nah, dengan merumuskan solusi atau intervensi yang dapat mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Solusi ini bisa berupa penyesuaian dalam program pelatihan, peningkatan motivasi narapidana, atau perbaikan dalam infrastruktur dan sumber daya yang tersedia.

Dalam menganalisis masalah ini ada asesmen untuk mengetahui minatnya agar dapat diarahkan dengan baik ke dalam bidang yang benar-benar cocok dengan mereka. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Nanda selaku staff bimker progam pembinaan kemandirian Lapas kelas 1.

> *"Nah, setelah masuk kesini kami akan melakukan asesmen seperti latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki. Hal itu kami lakukan untuk benar-benar mengetahui minat WBP. Dari situ kita dapat melihat minat WBP condong ke keterampilan apa. Nah setelah itu kita arahkan ke kebersihan selama 2-3 Minggu, itu gunanya untuk menilai mereka rajin atau tidak mbak, jadi nanti kita bisa melihat etos kerjanya disitu dulu."*

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa ketika narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP) pertama kali masuk ke Lapas Kelas 1 Semarang, pihak lapas akan melakukan asesmen atau penilaian terhadap mereka. Asesmen ini mencakup beberapa aspek penting, seperti latar belakang sosial, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan keterampilan yang sudah dimiliki oleh narapidana. Setelah itu mereka akan diarahkan ke kebersihan selama 2-3 minggu untuk melihat kinerja awalnya tersebut.

Tujuan dari asesmen ini adalah untuk memahami secara mendalam minat dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Dengan mengetahui minat narapidana, pihak lapas dapat menentukan jenis keterampilan atau program pembinaan kemandirian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Ini memastikan bahwa program yang diberikan relevan dan dapat membantu narapidana mengembangkan keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka setelah keluar dari lapas.

3. Tahap Penentuan Tujuan

Berdasarkan hasil analisis masalah dan asesmen narapidana, tujuan utama program pembinaan kemandirian dirumuskan. Tujuan ini mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan kepercayaan diri, dan persiapan narapidana untuk reintegrasi sosial setelah mereka bebas. Seperti kemampuan narapidana untuk mencari pekerjaan, memulai usaha mandiri, atau mengurangi kemungkinan mengulangi tindak kriminal. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Nanda selaku staff bimker pembinaan Lapas kelas 1.

> *"Sebenarnya program ini bertujuan untuk membentuk kemampuan berpikir kritis dan rasa tanggung jawab narapidana dalam menjalankan tugas dengan efektif dan benar. Hal ini bertujuan agar narapidana memiliki arah masa depan yang jelas. Salah satu hasil dari pemberdayaan ini adalah membekali narapidana dengan keterampilan untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten, baik dalam berwirausaha maupun mengisi peluang kerja yang tersedia setelah bebas. Selain itu, pelatihan kemandirian ini juga membantu narapidana untuk aktif dalam kegiatan pemberdayaan di masyarakat, meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki citra diri mereka di mata lingkungan, serta mendukung kemampuan mereka untuk menafkahi keluarga, terutama bagi yang sudah berkeluarga. Secara keseluruhan menggambarkan bagaimana program tersebut tidak hanya berfokus pada keterampilan kerja, tetapi juga pada aspek-aspek yang lebih holistik seperti pengembangan diri, tanggung jawab sosial, dan perbaikan hubungan dengan keluarga serta masyarakat."*

Dengan melalui tahap penentuan tujuan ini, program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang dapat diimplementasikan dengan jelas dan fokus, sehingga narapidana dapat diberdayakan secara optimal untuk menghadapi kehidupan setelah mereka bebas.

4. Perencanaan Tindakan

Perencanaan tindakan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang mencakup langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Berikut adalah tahapan perencanaan tindakan diantaranya:

1. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik narapidana berdasar kan asesmen awal, seperti jenis keterampilan yang perlu dikembangkan dan minat narapidana.

"Pertama-tama, kami melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik narapidana, seperti keterampilan apa yang perlu mereka kembangkan dan apa saja minat mereka. Dari situ, kami bisa menentukan program pelatihan yang paling sesuai.

Gambar 7.1 Assesment Calon Peserta Pembinaan Kemandirian

(Sumber: Dokumen Progam Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas 1 Semarang)

Langkah pertama dalam merencanakan program pembinaan kemandirian adalah memahami kebutuhan spesifik narapidana melalui asesmen awal. Asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan apa yang perlu dikembangkan oleh narapidana, serta mengetahui minat mereka. Dengan melakukan asesmen ini, pihak Lapas dapat menentukan jenis pelatihan yang paling sesuai dan efektif bagi masing-masing narapidana. Misalnya, jika asesmen menunjukkan bahwa seorang narapidana memiliki minat atau potensi dalam bidang pertukangan, maka program pelatihan keterampilan yang diberikan akan difokuskan pada bidang tersebut. Dengan cara ini, program pembinaan kemandirian dapat lebih tepat sasaran, relevan, dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi narapidana.

2. Mengembangkan rencana pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Ini mencakup penentuan materi pelatihan, durasi, dan alat yang digunakan.

Setelah mengidentifikasi kebutuhan spesifik narapidana, langkah berikutnya adalah merancang program pelatihan yang sesuai. Proses pengembangan rencana pelatihan ini mencakup beberapa aspek penting:

3. Penentuan Materi Pelatihan: Memilih dan menyusun materi pelatihan yang relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh narapidana.

> *"Jadi kita itu ada unit yang sudah terdaftar di disnaker mbak seperti halnya unit rotan, bakery, penjahitan, nah nantinya akan ada pelatihan dari sana sebanyak 2 kali dalam setahun kemudian untuk unit yang lain itu kita seringnya dari petugas sendiri ataupun memnag itu sudah skill yang dimiliki dari WBP sendiri, jadi, ketika ada WBP baru yang masuk di unit itu nanti bisa diajarin dari senior unit tersebit."*

4. Metode Pengajaran: Menentukan cara pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi,

> *"Saat pelatihan metode pengajaran yang diberikan itu materi lalu praktik mbak, jadi ketika WBP hanya mendapatkan materi saja tanpa praktik itu akan membuat mereka susah dalam menerapkannya, itu juga sebagai cara agar efektif dan mudah dipahami oleh WBP."*

5. Alat yang Digunakan: Menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk mendukung pelatihan

> *"Untuk alat dan bahan semuanya sudah disediakan 100% oleh petugas Lapas mbak, jadi nanti WBP tinggal menggunakannya saja, jika ada kekurangan alat atau bahan nanti bisa lapor ke petugas."*

6. Fasilitas Pendukung: Menyediakan ruang atau tempat yang sesuai untuk pelaksanaan program.

> *"untuk ruangan keterampilan kita ada sendiri-sendiri mbak, jadi per- unit satu ruangan yang disediakan.*

Gambar 8.1 Denah Ruang Kerja keterampilan

(Sumber: Dokumentasi Petugas Lapas Kelas 1 Semarang)

Dengan merancang rencana pelatihan yang terstruktur seperti ini, program dapat berjalan lebih efektif dan membantu narapidana mengembangkan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan mereka setelah bebas. Kemudian dengan memastikan bahwa semua sumber daya ini tersedia dan dikelola dengan baik, program pembinaan kemandirian dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

7. Menetapkan peran dan tanggung jawab setiap petugas lapas serta pihak eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan program, memastikan koordinasi yang efektif.

Dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian di Lapas, penting untuk menentukan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian dari program. Ini melibatkan:

1. Menetapkan Peran Petugas Lapas: Membagi tugas secara jelas di antara petugas lapas, misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas administrasi, pengawasan, atau penyediaan fasilitas selama pelatihan.

"iya mbak, jadi disini kita sebenarnya sudah terstruktur jabatannya, akan tetapi untuk bertanggung jawab terhadap program ini kita lakukan bersama-sama,

yaaa saling membantu satu sama lain gitu"(wawancara dengan bapak Firman, staff bimker, 28 Agustus 2024)

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa meskipun jabatan di tempat tersebut sudah terstruktur atau memiliki pembagian peran yang jelas, tanggung jawab terhadap pelaksanaan program tetap dijalankan secara kolektif. Artinya, meskipun ada peran dan jabatan yang jelas, semua pihak tetap bekerja sama dan saling membantu dalam menjalankan program tersebut. Ini mencerminkan adanya budaya kerja yang kolaboratif, di mana setiap orang turut berkontribusi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

2. Memastikan Koordinasi yang Efektif: Mengatur komunikasi dan koordinasi yang baik antara petugas lapas dan pihak eksternal. Hal ini penting agar setiap pihak memahami tugas dan perannya, sehingga program dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan.

"Tentu, memastikan koordinasi yang efektif sangat penting. Kami berusaha mengatur komunikasi dan koordinasi yang baik antara petugas lapas dan pihak eksternal. Ini kami lakukan agar setiap pihak memahami tugas dan perannya dengan jelas, sehingga program yang dijalankan bisa berjalan lancar tanpa hambatan.".(wawancara dengan bapak firman selaku staff bimker lapas)

Dengan menetapkan peran dan tanggung jawab dengan jelas, semua pihak yang terlibat dapat bekerja secara sinergis, memastikan program pembinaan kemandirian berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

5. Tahap Pelaksanaan Tindakan

Setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian selesai disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan proses penting dalam mewujudkan perubahan yang

diinginkan melalui implementasi tindakan yang telah direncanakan. Berikut langkah-langkahnya :

1. Implementasi Progam Pelatihan

   Melaksanakan pelatihan keterampilan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ini mencakup program pembinaan kemandirian narapidana yang berdasarkan pelatihan yang telah disediakan, yang mana nanti dapat digunakan setelah mereka bebas. Ada beberapa tahapan pelaksanaan program pembinaan kemandirian ini yaitu:

   Gambar 9.1 Tahapan pelaksanaan Progam Pembinaan Kemandirian

(Sumber: Dokumentasi Petugas Lapas)

   a. Pendaftaran Program Pembinaan Kemandirian

      Tahap pertama dimulai dengan warga binaan Permasyaraktan yang mengajukan diri untuk mengikuti program pembinaan kerja.

      > *"Tahap pertama ini dimulai dengan warga binaan yang mengajukan diri untuk mengikuti program pembinaan kerja. Mereka biasanya menyampaikan minat dan motivasi mereka kepada petugas yang bertanggung jawab atas program ini.*

Setelah itu, kami melakukan seleksi awal untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti perilaku selama masa tahanan, minat terhadap bidang tertentu, dan kesiapan mental. Seleksi ini penting untuk memastikan bahwa warga binaan yang terpilih benar-benar siap dan akan mendapatkan manfaat maksimal dari program pembinaan ini." (wawancara dengan bapak firman, staf bimker)

b. Pengisian Data Administrasi

Pada tahap ini Warga Binaan Permasyarakatan harus mengisi data administrasi.

"Setelah lolos seleksi awal, warga binaan kemudian harus mengisi data administrasi yang diperlukan untuk mengikuti program ini. Data administrasi ini mencakup informasi pribadi, riwayat hukum, dan minat kerja mereka. Pengisian data ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga binaan terdaftar dengan benar dan dapat diikutsertakan dalam program pembinaan yang sesuai dengan profil dan kebutuhan mereka."(wawancara dengan bapak firman, staff bimker)

c. Assesment Pekerja (Warga Binaan Permasyarakatan) Oleh Petugas Bimker

Tahap selanjutnya adalah assessment atau penilaian terhadap calon pekerja yang dilakukan oleh petugas bimbingan kerja (BIMKER). Penilaian ini bertujuan untuk memahami potensi dan kesiapan warga binaan.

Gambar 10.1 Assesment Calon Peserta Program Pembinaan Kemandirian

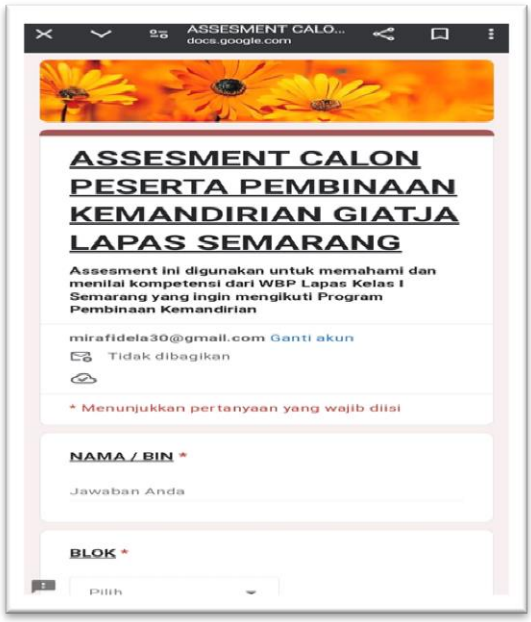

(Sumber: Dokumentasi Petugas Lapas)

> *"Tahap selanjutnya adalah assessment atau penilaian terhadap calon pekerja yang dilakukan oleh petugas bimbingan kerja (BIMKER). Jadi nanti WBP mengisi link assesment ini didampingi oleh petigas lapas mbak. Penilaian ini bertujuan untuk memahami potensi dan kesiapan warga binaan. Melalui assessment ini, kami bisa menentukan bidang kerja yang paling sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, serta memastikan bahwa mereka memiliki kesiapan mental dan fisik untuk mengikuti program pembinaan dengan baik. Nah point dari link assesment itu ada nama, blok, kamar, alamat asal dan domisili, perkara, vonis, pekerjaan, pendidikan, keterampilan saat di luar, keterampilan yang dapat diikuti di bidang kegiatan kerja, asessor. " ."(wawancara dengan bapak firman, staff bimker)*

d. Pengarahan Sesuai Minat Bakat

Berdasarkan hasil assessment, warga binaan akan diarahkan untuk mengikuti program pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

> *"Berdasarkan hasil assessment, warga binaan akan diarahkan untuk mengikuti program pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat*

mereka. Hasil penilaian ini membantu kami menempatkan mereka di program yang paling cocok, sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan dengan lebih efektif dan merasa lebih termotivasi. Tujuannya adalah agar mereka bisa memperoleh pengalaman dan kemampuan yang dapat mereka manfaatkan setelah kembali ke masyarakat.". (wawancara dengan bapak firman, staff bimker)

e. Pelatihan Kerja

Warga binaan kemudian mengikuti pelatihan kerja sebagai bagian dari pembinaan kemandirian.

Gambar 11.1 Pelatihan di Unit Bakery

(Sumber: Dokumentasi Petugas Lapas)

"Setelah diarahkan ke program yang sesuai, warga binaan kemudian mengikuti pelatihan kerja sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Pelatihan ini dirancang untuk membekali mereka dengan keterampilan praktis dan pengetahuan yang dapat mereka gunakan di dunia kerja nantinya. Melalui pelatihan ini, kami berharap mereka bisa lebih siap menghadapi tantangan di luar lapas dan mampu berkontribusi positif di lingkungan mereka setelah bebas." ."(wawancara dengan bapak firman, staff bimker)

f. Sidang TPP Peserta Bimbingan Kerja

Setelah menjalani pelatihan, peserta akan mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menilai hasil dari pelatihan tersebut dan kesiapan warga binaan untuk bekerja.

> *“Setelah menjalani pelatihan, peserta akan mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menilai hasil dari pelatihan tersebut dan kesiapan warga binaan untuk bekerja. Sidang TPP ini merupakan langkah evaluasi di mana kami melihat sejauh mana keterampilan yang telah mereka peroleh, serta kesiapan mereka untuk diterjunkan ke dunia kerja. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa mereka benar-benar siap dan mampu memanfaatkan pelatihan yang telah diberikan. Sidang TPP juga untuk menerbitkan SK agar resmi bisa bekerja.*

g. Warga Binaan siap bekerja

Warga binaan yang telah melalui semua tahapan ini dinyatakan siap untuk bekerja, baik di dalam lapas maupun setelah bebas.

> *"Warga binaan yang telah melalui semua tahapan ini dinyatakan siap untuk bekerja, baik di dalam lapas maupun setelah bebas. Mereka telah dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, serta dinilai siap secara mental dan fisik untuk bekerja. Dengan kesiapan ini, kami berharap mereka bisa memanfaatkan kesempatan kerja yang ada, baik selama masa pembinaan di dalam lapas maupun setelah mereka kembali ke masyarakat."*

h. Pengawasan dan Pembimbingan

Mengawasi pelaksanaan program untuk memastikan semua narapidana mengikuti pelatihan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. Petugas lapas juga memberikan pembimbingan langsung selama proses pelatihan.

Sebelum pelaksanaan program dimulai kami ada absen untuk kehadiran WBP, disamping absen kami juga mengecek dengan pasti WBP yang hadir. Selain itu kami mengawasi pelaksanaan program untuk memastikan semua narapidana mengikuti pelatihan sesuai jadwal dan standar yang telah ditetapkan. Petugas lapas juga memberikan pembimbingan langsung selama proses pelatihan, membantu warga binaan mengatasi kendala yang mungkin mereka hadapi, dan memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan manfaat maksimal dari program ini. Pendekatan ini memastikan kualitas pelatihan tetap terjaga dan warga binaan dapat berkembang dengan baik. (Wawancara dengan Bapak Nanda, staff bimker).

i. Penyelesaian dan tindak lanjut

Setelah pelatihan selesai, menyiapkan laporan hasil pelaksanaan program dan merencanakan tindak lanjut, seperti pemberian sertifikat keterampilan.

"Setelah pelatihan selesai, kami menyiapkan laporan hasil pelaksanaan program, Laporan ini menjadi dasar untuk merencanakan tindak lanjut, seperti pemberian sertifikat keterampilan sebagai pengakuan atas pencapaian mereka." (wawancara dengan bapak Burhan, kabid Giatja).

Gambar 12.1 Pemberian Sertifikat Pelatihan Rotan

(sumber: Arsip Dokumentasi Petugas Lapas)

6. Tahap Evaluasi

   Pertama, evaluasi terhadap program yang dilaksanakan merupakan langkah akhir yang bertujuan untuk memperbaiki aspek pemberdayaan, pengelolaan, serta pengembangan program tersebut. Rapat Monev Internal Bidang Giatja (Kegiatan Kerja) adalah rapat yang diadakan di Lapas Kelas 1 Semarang untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program kerja yang berlangsung di bidang kegiatan kerja narapidana. Tujuan utama rapat ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan kemandirian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan solusi dan perbaikan ke depan.

Gambar 13.1 Rapat Monev dengan PT. Philnesia International

(Sumber: Dokumentasi Lapas Kelas 1 Semarang)

Disini warga binaan dilatih untuk menguasai keterampilan praktis, seperti pertukangan atau pembuatan kerajinan, yang diharapkan dapat menjadi modal bagi mereka untuk mencari nafkah secara mandiri. Progam pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas 1 Semarang selalu memegang prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan

berkelanjutan. Prinsip dari pemberdayaan berpengaruh pada proses pemberdayaan yang dilakukan, menurut (Najiati et al., 2005) ada beberapa prinsip pemberdayaan yaitu **:**

1. Prinsip Kesetaraan

   Kesetaraan merupakan prinsip yang utama dalam melakukan pemberdayaan, dengan prinsip ini menunjukkan adanya tindakan yang sama dan kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi dan rendah antara satu dengan yang lainnya. Prinsip kesetaraan dalam program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap narapidana memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka.

   Semua narapidana, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kriminal, diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program pembinaan kemandirian, memastikan tidak adanya diskriminasi terkait siapa yang dapat ikut serta. Setiap narapidana juga diberi peluang untuk berkontribusi dalam kegiatan kemandirian, seperti pembuatan kerajinan, keterampilan teknis, atau usaha kecil, di mana hasil kerja keras mereka diakui dan diperlakukan secara setara tanpa pembedaan berdasarkan jenis kejahatan atau masa hukuman. Program ini menjamin akses yang setara terhadap sumber daya, seperti ruang kerja, alat, dan bahan baku, tanpa adanya kelompok yang diistimewakan dalam penggunaan fasilitas. Prinsip kesetaraan dalam pembinaan kemandirian juga berarti bahwasanya narapidana diperlakukan dengan hormat sebagai individu yang memiliki hak untuk berubah dan memperbaiki diri, serta diberi peluang adil untuk mengubah hidup mereka melalui kemandirian.

   Setiap individu mungkin memilih pelatihan berdasarkan minat pribadi, ada kemungkinan terjadi kesenjangan dalam keterampilan yang dipelajari oleh narapidana. Beberapa narapidana banyak yang memilih keterampilan yang lebih populer dan mudah, sementara yang

lain ada yang merasa terjebak dengan pilihan terbatas. Secara keseluruhan, meskipun niatnya baik, penyesuaian program pembinaan berdasarkan minat dan bakat narapidana bisa menghasilkan tantangan dalam penerapan.

Sebagai contoh, kasus yang dialami oleh narapidana berinisial D. Beliau memiliki latar belakang bekerja di klinik, namun diarahkan oleh petugas untuk mengikuti program kerajinan mendoan. Akibat ketidaksesuaian dengan minat dan keahliannya, beliau kehilangan semangat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program tersebut dan hanya bertahan selama tiga bulan. Setelah itu, beliau dipindahkan ke program keterampilan laundry. Meskipun tidak sepenuhnya berminat, beliau mematuhi arahan tersebut, karena mayoritas narapidana yang ditempatkan di bagian laundry memiliki vonis hukuman panjang. Pada dasarnya, motivasi beliau untuk mengikuti program pembinaan cenderung rendah, namun untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, mengikuti program ini dianggap lebih baik daripada hanya berdiam diri di kamar yang dapat memicu pikiran negatif. Dengan vonis seumur hidup yang diterimanya, beliau tetap harus mengikuti program keterampilan laundry ini, karena kenyataannya, hidupnya akan terus berlangsung di dalam lapas.

> *"Ya, bagaimana lagi, mbak. Saya divonis seumur hidup, jadi mau tidak mau harus menjalani hidup di sini. Dengan mengikuti kegiatan yang ada, saya merasa hidup ini masih bisa bermanfaat. Kalau tidak ada kegiatan seperti ini, mungkin saya sudah stres hanya berdiam diri di kamar."*

2. Prinsip Patisipasi

Program pemberdayaan yang bersifat partisipatif dapat menumbuhkan kemandirian. Tetapi untuk mencapai kemandirian diperlukan peran pendamping yang melibatkan pendamping yang bersedia berpatisipasi terhadap pemberdayaan masyarakat (Najiati et al., 2005). Menurut (Nardin, 2019:143) bahwasanya program pemberdayaan yang bersifat partisipatif di mana peserta aktif terlibat

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dapat mendorong tumbuhnya kemandirian**.** Partisipasi ini memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan rasa tanggung jawab dalam mengambil peran aktif terhadap perbaikan diri dan lingkungan mereka. Namun, pada prinsip partisipasi ini, narapidana tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, karena seluruh pengaturan dan keputusan terkait sepenuhnya dikendalikan oleh pejabat dan pelaksana di lapas.

> "*kalau untuk partisipasi narapidana tidak dilibatkan secara langsung dalam setiap tahap program pembinaan kemandirian mbak, untuk perencanaan dan pelaksanaan yang mengatur dari pejabat dan pelaksana di Lapas"(wawancara dengan bapak nanda, staf bimker)*

3. Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip ini berfokus pada upaya untuk mengembangkan kemampuan narapidana agar dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. Dengan prinsip ini Lapas Kelas 1 Semarang melakukan kegiatan pelatihan ini dirancang untuk mengasah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki narapidana sehingga mereka mampu mengandalkan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik selama di dalam lapas maupun setelah kembali ke masyarakat. Prinsip kemandirian juga menyasar kesiapan narapidana untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Mereka diajarkan bagaimana mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri, sehingga mampu berfungsi secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Dengan penerapan prinsip ini, program pembinaan di Lapas Kelas 1 Semarang bertujuan untuk menciptakan narapidana yang mandiri, mampu mengelola kehidupan mereka sendiri, dan tidak kembali bergantung pada tindak kriminal untuk bertahan hidup.

4. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu adanya proses berkelanjutan, pada awal proses pemberdayaan, peran pendamping akan lebih dominan

dari pada masyarakatnya. Namun untuk jangka Panjang peran pendamping akan berkurang atau bahkan menghilang karena masyarakat mampu mengelola kegiatan secara mandiri (Najiati et al., 2005). Prinsip ini berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa dampak positif dari program tersebut dapat terus dirasakan oleh narapidana dalam jangka panjang, baik selama masa hukuman maupun setelah bebas. Yang mana program ini dirancang untuk memberikan narapidana keterampilan yang dapat terus mereka gunakan dan kembangkan setelah keluar dari lapas. Disini narapidana mendapatkan pelatihan dua kali dalam satu tahun, tetapi pendampingan secara berkcelanjutan selama masa pidana terus berjalan mereka. Ini memastikan bahwa pembelajaran terus berlangsung dan keterampilan mereka terus diasah.

> *"Disini kita ada pelatihan dari luar sebanyak dua kali dalam setahun mbak, jadi nanti teman-teman mengikuti pelatihan tersebut bersama-sama, kita dapat materi terus kita praktik gitu mbak, nah biasanya kalau teman saya minta diajarin tekhnik contoh di keterampilan rotan biasanya saya ajarin, intinya kita saling membantu satu sama lain mbak, bekerja sama." (wawancara dengan bapak JM selaku narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian)*

Untuk memastikan keberlanjutan setelah narapidana dibebaskan, pihak lapas seringkali bekerja sama dengan berbagai lembaga eksternal yang menyediakan dukungan lanjutan, seperti bantuan pekerjaan, akses permodalan, atau pelatihan tambahan. Hal ini bertujuan untuk membantu narapidana menerapkan keterampilan yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Seperti halnya yang dikatan (Samudra, 2021) bahwasanya keberlanjutan kesejahteraan inilah yang membutuhkan penguatan program dari luar lapas atau mitra kerja pihak ketiga

> *"Nah, di sini kami juga bekerja sama dengan pihak eksternal, Mbak. Contohnya, untuk kerajinan rotan, kami bekerja sama dengan PT. Philnesia. Kerja sama ini saling menguntungkan, Mbak. Dari pihak PT. Philnesia, mereka mendapatkan tenaga*

kerja dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pekerja non-narapidana, karena mereka tidak perlu memikirkan biaya makan atau fasilitas lainnya—itu sudah ditanggung oleh pihak lapas. Di sisi lain, kami juga diuntungkan, karena para narapidana yang membuat produk rotan tidak bekerja sia-sia. Sudah jelas kemana produk-produk ini akan didistribusikan, jadi tidak ada barang yang mubazir. Semua yang mereka kerjakan bisa laku terjual."(wawancara dengan bapak firman, staff bimker Lapas)

Oh iya, Mbak, kami juga punya alumni lapas yang dulu pernah menjalani pelatihan di sini, dan sekarang sudah bekerja di PT. Philnesia. Dia malah rajin sekali kerjanya di sana, sampai-sampai atasannya bilang kalau kinerjanya sangat baik dan patut dibanggakan. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa stigma masyarakat terhadap mantan narapidana yang selalu dinilai negatif sebenarnya bisa dihilangkan. Lewat pelatihan kemandirian di lapas, mereka bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan terampil. Skill yang mereka asah selama di sini sangat berguna untuk kehidupan mereka setelah bebas nanti. (wawancara dengan bapak nanda staff bimker lapas)

Dengan prinsip keberlanjutan, program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang bertujuan untuk memberikan narapidana bekal yang tidak hanya membantu mereka selama di lapas, tetapi juga terus memberikan manfaat sepanjang hidup mereka, sehingga mengurangi risiko kembali melakukan tindakan kriminal.

B. Analisis Efektivitas Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang

Efektivitas pemberdayaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kemandirian, keterampilan dan karakter dari masyarakat, termasuk narapidana. Efektivitas pemberdayaan narapidana di Lembaga Permasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan program-program pembinaan yang diterapkan saja, akan tetapi juga penting untuk memahami proses pemberdayaan yang mana proses pemberdayaan merupakan transformasi persepsi individu untuk memungkinkan adaptasi

terhadap lingkungan, serta memupuk kesadaran atau motivasi dalam diri individu. Interaksi atau stimulus eksternal yang diperlukan dalam proses ini, dengan salah satu cara adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

Meskipun harus diakui bahwa pembinaan itu membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, tetapi, seiring dengan berjalannya masa tahanan, narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali berbaur di dalam masyarakat. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan ditujukan untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan narapidana akan dapat terlaksana secara maksimal dengan menjalin kerjasama melalui pihak ketiga, baik dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta, yang dapat memberikan bimbingan keterampilan yang bermanfaat di masyarakat apabila kelak telah habis masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan.

Efektivitas pemberdayaan narapidana juga bisa dinilai dari kemampuan serta keyakinan diri mereka dalam menggunakan sumber daya yang tersedia, seperti yang mereka peroleh dari lingkungan sekitarnya. Di tahap berikutnya, efektivitas peningkatan dan pembinaan narapidana juga bisa diukur dari kinerja dan hasil yang tercapai dalam proses pembinaan, seperti peningkatan kemampuan dan keyakinan diri, serta kesadaran dan kekuatan dalam membentuk masa depan mereka sendiri. Adanya indikator efektivitas pemberdayaan narapidana dapat membantu untuk menilai sejauh mana efektivitasnya (Aulia, 2021), berikut diantaranya:

1. Pemahaman program, narapidana memiliki pemahaman terhadap program pemberdayaan yang mereka terima.

   Pentingnya untuk memastikan narapidana yang mengikuti program pemberdayaan memahami dengan jelas tujuan, manfaat, dan langkah-langkah program tersebut. Pemahaman ini mencakup tujuan

seperti membekali mereka dengan keterampilan kerja atau meningkatkan kemandirian, manfaat seperti peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja, serta proses yang harus dijalani. Ketika narapidana memahami dengan baik apa yang diharapkan dari mereka, mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan serius dalam pelatihan. Pemahaman yang baik juga penting untuk kesuksesan reintegrasi setelah bebas, karena narapidana lebih siap memanfaatkan keterampilan yang dipelajari. Singkatnya, pemahaman yang baik terhadap program adalah kunci untuk menciptakan pembinaan yang sukses dan berdampak jangka panjang. Seperti halnya yang dikatan bapak Nanda selaku staff bimker :

> *"Kami berusaha memastikan bahwa narapidana memiliki pemahaman yang baik terhadap program pemberdayaan yang mereka terima. Sebelum program dimulai, kami memberikan penjelasan mendetail tentang tujuan, manfaat, dan langkah-langkah yang akan mereka jalani. Dengan pemahaman yang baik juga narapidana akan lebih mudah mengaplikasikan keterampilan yang mereka pelajari dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif."*

Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan bapak JWW selaku salah satu narapidana yang mengikuti program keterampilan tersebut bahwasanya narapidana harus paham akan program yang diberikan kepada mereka :

> *"Iya, saya merasa cukup memahami program pemberdayaan yang kami terima."*

Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwasanya narapidana merasa cukup memahami akan program yang diberikan, sebelum program dimulai, mereka diberi penjelasan tentang tujuan dan manfaat dari pelatihan ini, serta bagaimana keterampilan yang dipelajari dapat membantu mereka setelah bebas nanti. Selama pelatihan, jika ada hal yang belum dipahami, petugas selalu siap memberikan penjelasan lebih lanjut, jadi program ini sangat membantu narapidana untuk mempersiapkan diri ke depannya. Akan tetapi juga ada beberapa

narapidana yang tidak memahami pentingnya program pembinaan ini, itu menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Dengan demikian pemahaman program ini belum 100% dipahami oleh seluruh narapidana. Sehingga efektivitas dalam program ini maih belum maksimal.

2. Tepat sasaran, pemberdayaan dan pembinaan narapidana berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

   Program pemberdayaan dan pembinaan narapidana dirancang dengan tujuan spesifik, seperti membekali mereka dengan keterampilan kerja, meningkatkan kemandirian dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah bebas. "Tepat sasaran" berarti bahwa semua upaya dan kegiatan dalam program ini benar-benar fokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

   > “Kami selalu berusaha memastikan bahwa program pemberdayaan dan pembinaan narapidana berlangsung tepat sasaran. Setiap kegiatan dirancang untuk sesuai dengan tujuan utama, yaitu membekali narapidana dengan keterampilan yang dapat membantu mereka setelah bebas. Akan tetapi untuk monitoring kita masih kurang mbak, dan ini sedang kita perbaiki.”(wawancara dengan bapak nanda, staff bimker)

   Begitu juga sejalan dengan yang dikatakan bapak IN selaku narapidana yang mengikuti keterampilan tersebut, *“…Menurut saya, program ini sudah tepat sasaran…”* (hasil wawancara). Lebih jauh lagi menurut IN, narapidana diberikan pelatihan sesuai dengan keterampilan yang bisa digunakan nanti setelah bebas. Mereka diberikan pelatihan sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi tujuan pembinaan ini membekali mereka dengan keterampilan dan kemandirian dalam mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah bebas benar-benar tercapai. Sehinnga nilai efektivitas ini sudah tercapai dengan dibuktikannya tepat sasaran sesuai tujuan yang ada.

3. Tepat waktu, pemberdayaan dan pembinaan narapidana dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

> *"Kami selalu berusaha menjalankan program pemberdayaan dan pembinaan narapidana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setiap pelatihan memiliki jadwal yang jelas, dan kami memastikan bahwa narapidana hadir tepat waktu dan mengikuti semua sesi yang telah direncanakan. Hal ini penting agar proses pembinaan berjalan efektif dan narapidana bisa memaksimalkan waktu mereka untuk belajar serta mengembangkan keterampilan."(wawancara denga bapak firman, staff bimker)"*

Pernyataan tersebut sesuai dengan bapak N selaku narapidana yang mengikuti program :

> *"Iya, saya merasa program ini benar-benar berjalan sesuai jadwal. Setiap pelatihan dimulai jam 08.00 dan selesai jam 15.00,tetapi jika ada lemburan pesanan bisa sampai jam 17.00 itu sudah dapat izin dari petugas. Sehingga kami bisa fokus dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin.*

Dari point tepat waktu tersebut dinilai bahwasanya program pembinaan kemandirian ini sudah tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yaitu narapidana mulai melaksanakan pelatihan setiap harinya pada pukul 08.00 dan selesai pukul 15.00. Akan tetapi juga ada perpanjangan waktu dalam pelaksanaanya ketika narapidana ada lemburan pekerjaannya. Jadi, dari adanya perpanjangan waktu tersebut menunjukkan bahwasanya point tepat waktu masih kurang maksimal diterapkan di program pembinaan ini dan menunjukkan efektivitas

4. Tercapainya tujuan, pemberdayaan dan pembinaan narapidana berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program pemberdayaan pembinaan narapidana dirancang dengan tujuan spesifik, seperti meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kesiapan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Ketika tujuan ini tercapai, narapidana berhasil mendapatkan manfaat yang diharapkan,

baik dari segi keterampilan kerja, perubahan sikap, maupun kesiapan mental.

> *"Kami menilai bahwa program pemberdayaan dan pembinaan narapidana sudah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Narapidana yang mengikuti program menunjukkan peningkatan keterampilan, kemandirian, dan kesiapan untuk reintegrasi ke masyarakat.."(wawancara dengan bapak firman, staff bimker)*

Hal tersebut juga di perkuat oleh bapak D selaku narapidana yang mengikuti progam pelatihan :

> *Menurut saya, program ini telah berhasil mencapai tujuannya.*

Narapidana merasa dirinya lebih mandiri dan memiliki keterampilan baru yang bisa digunakan setelah bebas nanti. Pelatihan yang diberikan benar-benar membantu narapidana memahami bagaimana cara bekerja dan berkontribusi setelah keluar dari sini. Jadi, tujuan dari program ini yaitu membekali narapidana dengan keterampilan dan kemandirian sudah tercapai. Yang mana menunjukkan efektivitas dari program ini juga tercapai.

5. Perubahan

Pemberdayaan dan pembinaan narapidana menyebabkan perubahan positif dalam kemandirian dan karakter narapidana. Melalui program pembinaan kemandirian ini narapidana diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan di dunia nyata, yang mendorong mereka untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain setelah bebas. Kemandirian ini memungkinkan mereka menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan berdaya guna mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah masa hukuman. Perubahan positif ini menjadi bagian dari proses rehabilitasi yang diharapkan dapat mengurangi risiko pengulangan tindak pidana (residivisme). Secara keseluruhan, pemberdayaan dan pembinaan

narapidana memicu perubahan signifikan dalam kemandirian dan karakter, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

> *"Kami melihat perubahan yang sangat positif pada narapidana setelah mereka mengikuti program ini. Mereka menjadi lebih mandiri, terutama dalam hal mengelola keterampilan yang dipelajari, dan lebih percaya diri menghadapi masa depan. Ini menunjukkan bahwa program pembinaan ini berhasil membantu mereka untuk bertransformasi secara positif." (wawancara dengan bapak nanda, staff bimker)*

Begitu juga diperkuat dengan pendapat dari bapak N selaku narapidana yang mengikuti pelatihan tersebut :

> *"Iya, saya merasa ada perubahan yang sangat positif dalam diri saya.*

Program ini telah membantu narapidana menjadi lebih mandiri, terutama dalam mengelola diri. Mereka merasa dirinya lebih terarah, lebih percaya diri dan memiliki rencana setelah bebas nanti. Selain itu, karakter yang dimiliki narapidana juga berubah yang mana menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwasanya efektifitas dari program ini tercapai dengan adanya perubahn diri dari narapidana.

Untuk menilai keefektivitasan pemberdayaan narapidana juga diperlukan adanya tujuan pemberdayaan yang terealisasikan. Menurut Mardikanto (2015) dalam (Maryani, Dedeh., 2019: 8-10) terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, perbaikan masyarakat. Namun dalam penelitian ini untuk menilai keeefektivitasan ini, hanya dibutuhkan beberapa indikator tujuan pemberdayaan saja, yaitu sebagai berikut :

1. Perbaikan Pendapatan

Perbaikan pendapatan dalam konteks pemberdayaan ini adalah menciptakan kemandirian finansial bagi narapidana, di mana dengan keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan manajemen keuangan yang dimiliki, mereka akan mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa kembali terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam program ini, peningkatan pendapatan narapidana terjadi karena mereka melakukan pekerjaan layaknya masyarakat umum, meskipun dengan akses yang terbatas. Narapidana berpartisipasi dalam simulasi kerja di dalam lapas dan menerima premi setiap bulan, mirip dengan sistem kerja di luar. Program ini dapat meningkatkan pendapatan mereka selama di lapas serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah bebas. Dengan demikian, perbaikan pendapatan melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Semarang sesuai dengan point tujuan yaitu mempersiapkan narapidana agar mandiri secara ekonomi, baik melalui pekerjaan maupun usaha mandiri, sehingga dapat berperan produktif di masyarakat setelah mereka keluar dari lapas.

2. Perbaikan Kehidupan

Dengan memberikan pelatihan kemandirian ekonomi dan kesempatan kerja, program pembinaan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan narapidana pada bantuan sosial atau kegiatan ilegal setelah mereka bebas. Kemandirian ekonomi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah kembalinya narapidana ke kehidupan kriminal.

> *"Bahwasanya dengan melakukan kegiatan pelatihan keterampilan ini yang hampir memakan waktu sehari, kami lebih merasa kehidupan di Lapas bernilai positif. Karena sepenuhnya kami melakukan kegiatan positif tiap harinya."*

Narapidana merasa bahwasanya dengan melakukan pelatihan tersebut menjadikan mereka lebih bertindak dan berpikir positif kedepannya. Dalam melakukan pelatihan keterampilan kerja, yang mana dilakukan setiap hari kecuali hari libur di hari minggu. Dengan menjalani hidup di Lapas ini narapidana merasa hidupnya lebih disiplin dan tanggung jawab karena adanya aturan-aturan yang harus dilakukan. Secara keseluruhan, perbaikan kehidupan dalam program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Semarang tercapai dengan baik.

3. Perbaikan masyarakat

Dengan mengembangkan keterampilan, mentalitas positif, dan pengetahuan sosial, narapidana dapat berkontribusi secara konstruktif dalam komunitas mereka dan membantu mengurangi stigma terhadap mantan narapidana. Pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan tidak hanya tentang memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mempersiapkan narapidana untuk mengubah perilaku dan sikap mereka sehingga mereka dapat berhasil dan berkontribusi secara positif setelah masa hukuman mereka berakhir. Disisi lain mereka juga dibekali dengan wawasan untuk menghadapi stigma sosial yang ada dalam masyarakat saat mereka akan masuk dalam program pembinaan kemandirian atau kepribadian.

Dengan demikian, perbaikan masyarakat dalam program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Semarang bertujuan untuk memanfaatkan potensi narapidana sebagai agen perubahan positif dalam komunitas belum bisa dinilai ekektifitasnya, karena hal ini masih menjadi tantangan tersendiri dari pihak Lapas. Dengan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi yang sukses dan mengarahkan mereka pada kontribusi yang bermanfaat, program ini berupaya meningkatkan kualitas masyarakat secara

keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan produktif.

Tidak lupa juga dengan memperhatikan indikator kinerja Lapas dalam target-target kinerjanya, seperti halnya yang tercantum dalam (*Rencana Strategis Lapas Kelas I Semarang 2020-2024*, 2024):

1. Proporsi pelayanan pemasyarakatan yang memenuhi standar untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam mendukung implementasi sistem pemasyarakatan merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi sistem pemasyarakatan yang efektif.

   Dalam program pembinaan ini Lapas mewujudkan fasilitas yang memadai, ketersediaan peralatan dan bahan baku di Lapas Kelas 1 Semarang yang sesuai digunakan untuk mendukung proses pelatihan secara optimal. Infrastruktur yang memadai digunakan untuk kegiatan pelatihan dan pembelajaran, termasuk ruang pelaksanaan program yang layak serta mendukung program pelatihan yang diberikan. Selain itu untuk memenuhi harapan masyarakat, pelatihan yang diberikan berfokus pada keterampilan yang diminati di pasar kerja lokal dan nasional dan juga keterampilan wirausaha untuk narapidana yang akan kembali ke masyarakat.

   Akan tetapi faktor kurangnya evaluasi berkala tanpa evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan terhadap kemajuan narapidana, sulit untuk mengukur efektivitas program pembinaan. Kurangnya data yang akurat dan penilaian yang mendalam dapat menyebabkan program berjalan tanpa arah yang jelas. Apalagi dengan adanya stigma dari masyarakat, meskipun narapidana telah melalui program pembinaan kemandirian, stigma sosial yang melekat dapat membuat masyarakat enggan menerima mantan narapidana, baik dalam hal pekerjaan maupun lingkungan sosial. Hal ini dapat

menyebabkan kegagalan resosialisasi meskipun narapidana telah dibekali keterampilan yang memadai.

2. Proporsi narapidana dan tahanan yang patuh terhadap hukum untuk meningkatkan persentase program pembinaan guna memperbaiki reintegrasi sosial.

   Merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang. Kepatuhan ini dapat berdampak langsung pada keberhasilan program pembinaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan persentase narapidana yang mampu menjalani reintegrasi sosial dengan baik setelah masa tahanan berakhir. Program pembinaan yang efektif tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga membantu narapidana dalam membentuk karakter, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Narapidana yang patuh terhadap program ini artinya mereka patuh terhadap hukum juga yang mana akan lebih siap menghadapi tantangan di luar lapas.

   Akan tetapi masih adanya narapidana yang melakukan residivisme setelah mereka lepas dari Lapas, yang mana terdapat narapidana yang mengikuti program pelatihan di rotan sintesis selama dua tahun, namun setelah satu tahun bebas dia kembali lagi terkena kasus yang sama dan mengikuti program yang sama lagi yaitu pelatihan rotan sisntesis. Hal ini menunjukkan bahwasanya masih kurangnya efektivitas yang dinilai dari patuh terhadap hukum.

   Demikian adanya motivasi narapidana yang minim menyebabkan ketidakpedulian narapidana terhadap program. Beberapa narapidana seringkali tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam program pembinaan karena mereka merasa bahwa pembinaan tidak memberikan manfaat jangka pendek dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pembinaan. Karena

narapidana yang tidak memahami pentingnya program pembinaan dalam mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial dapat kurang termotivasi untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan.

3. Jumlah narapidana yang terlibat dalam pekerjaan atau pelatihan keterampilan selama masa pembinaan dengan tujuan mencapai kemandirian individu.

   Adanya keterlibatan ini bertujuan untuk membantu narapidana mencapai kemandirian individu sehingga mereka mampu kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan secara legal dan mandiri. Penghasilan yang mereka dapat di Lapas juga mengajarkan arti kemandirian bagi mereka, yang artinya dengan premi tersebut mereka bertanggung jawab atas kehidupan ekonimnya di Lapas. Dengan melibatkan lebih banyak narapidana dalam pekerjaan atau pelatihan keterampilan, program pemberdayaan di Lapas Kelas 1 Semarang masih kurang efektif karena dinilai belum 100% narapidana merasa dirinya mandiri.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Proses pemberdayaan narapidana melalui program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Semarang melibatkan enam tahap utama: pemaparan masalah, analisis masalah, pencapaian tujuan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi. Setiap tahap dirancang untuk memberikan narapidana keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan guna membantu mereka menjadi mandiri setelah keluar dari penjara, baik dengan bekerja sama dengan pihak lain atau mendirikan usaha sendiri.Program pemberdayaan kemandirian ini terbukti masih kurang efektif, ditunjukkan dengan masih kurangnya warga binaan dalam memahami program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapainya perubahan perilaku.

Efektivitas yang diukur dengan indikator kinerja lapas, seperti proporsi narapidana yang mengikuti pelatihan keterampilan dan terlibat dalam pekerjaan selama masa pembinaan juga masih terdapat kurangnya narapodana yang patuh terhadap hukum, yamg mana dibuktikan masih adanya residivisme, yakni mantan narapidana kembali melakukan tindak kriminal setelah keluar dari penjara. Pemberdayaan melalui program ini tidak hanya penting bagi narapidana dalam rehabilitasi, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan. Program ini memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berkembang secara ekonomi dan sosial, sehingga mereka lebih siap menghadapi kehidupan di luar lapas dan berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Secara keseluruhan, program ini merupakan upaya penting dalam mendukung reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, mengurangi kriminalitas, serta membantu mereka mencapai kemandirian dan kesejahteraan hidup

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian mengenai "Pemberdayaan Melalui Program Pembinaan Kemandirian Pada Lapas Kelas 1 Semarang". Peneliti memberikan saran secara objektif terhadap kondisi penelitian sebagai berikut :

1. Peningkatan Motivasi Narapidana: Penting untuk meningkatkan motivasi narapidana agar lebih antusias dalam mengikuti program pembinaan kemandirian. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat jangka panjang dari program serta memberikan penghargaan bagi narapidana yang menunjukkan kemajuan signifikan.
2. Pengembangan Program yang Lebih Fleksibel: Program pembinaan kemandirian perlu lebih fleksibel dan disesuaikan dengan masa hukuman narapidana. Untuk narapidana dengan masa hukuman singkat, perlu ada modul yang dipadatkan sehingga mereka tetap mendapatkan keterampilan yang relevan meski waktu terbatas.
3. Evaluasi Berkala Terhadap Efektivitas Program: Lapas Kelas 1 Semarang sebaiknya melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program pembinaan kemandirian, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan program selalu relevan dengan kebutuhan narapidana dan tujuan rehabilitasi.
4. Menyadari Tanggung Jawab Pasca Kebebasan: Narapidana perlu menyadari bahwa keterampilan dan pembinaan yang mereka terima selama di Lapas bukan hanya untuk masa hukuman, tetapi juga sebagai bekal untuk mandiri dan berkontribusi di masyarakat setelah bebas.
5. Peningkatan Keterampilan Petugas: Petugas lapas perlu diberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan tambahan terkait manajemen program pembinaan kemandirian. Ini mencakup keterampilan dalam mentoring, motivasi, dan penilaian efektivitas program agar dapat lebih efektif dalam mendukung narapidana.

6. Mengumpulkan dan Menggunakan Umpan Balik: Petugas lapas disarankan untuk secara aktif mengumpulkan umpan balik dari narapidana mengenai program pembinaan. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

DAFTAR PUSTAKA

Ababil, R. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Narapidana Dalam Perspektif Islam*. Universitas Airlangga.

Adisaputra, M. N. (2022). Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi Di Lapas Kelas Iia Cibinong. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 2). Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jjpp

Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian.

Akhyar, Z., Matnuh, H., & Najibbudin, M. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 4*.

Alfitri. (2011). *Community Development*. Pustaka Pelajar.

Anasmk. (2020). *Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang*. Tribun Jateng. Https://Tribunjatengwiki.Tribunnews.Com/2020/05/13/Lapas-Kelas-1-Kedungpane-Semarang?Page=All#Google_Vignette

Andika, S. (2022). *Efektivitas Program Asimilasi Narapidana Di Tengah Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Agung Kelas Ii B)*. Universitas Lampung.

Anggita, D. C., & Pangestuti, N. (2024). *Pembinaan Kemandirian Dalam Rangka Peningkatan Keterampilan Narapidana*. *7*, 109–116.

Anggriawan, E. S. D. (2017). *Peranan Tiga Pilar Sistem Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Karakter Warga Binaan Muslim Lapas Kelas I Semarang*. *62*, 30–59.

Angreni, T., Hanitha, V., Oktari, Y., Dama, L., & Rini, Y. (2023). *Pemberdayaan Keterampilan Warga Binaan Dalam Usaha Peningkatan Efikasi Diri Di Lapas Pemuda Kelas Iia Tangerang*. *3*(1). Https://Doi.Org/10.32877/Nr.V3i1.1016

Annas, A. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Celebes Media Perkasabps, 2018, Data Kabupaten Subang, 2018bps, 2018, Data Kecamatan Pusakanagara, 2018campbell, Jp 1989, Teori Efektivitas, Dalam Richard M: Efektivitas Organisasi 2005 Bandung: Erlanggadanim Sudarwan 2012. Motivasi, Kepemimpinan Dan Efek.

Anyaq, Y., Nanang, M., & Purba, R. (2022). Pemberdayaan Narapidana Melalui Kegiatan Kerja Di Lapas Kelas Ii A Kota Samarinda. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, *2022*(2), 1–12.

Aulia, T. (2021). *Efektivitas Progam Pembinaan Dan Bimbingan Di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Davis, & K, I. (1985). *Competency Based Learning Technology, And Design*. Mcgraw-Hill Book Company.

Effendy, O. U. (2006). *Hubungan Masyarakat*. Remaja Rosdakarya.

Equatora, M. A. (2018). *Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*. *7*(1), 19–26. Https://Doi.Org/10.15408/Empati.V7i1.9648

Gasela, Yesi, S. Dan L. F. (2021). *Pemasyarakatan Kelas Ii A Pangkalpinang*

Yesi Gasela , Sujadmi Dan Luna Febriani Universitas Bangka Belitung Diterima : Abstrak Direvisi : Disetujui : Keywords : Empowerment ; Prisoners ; Independence Pemberdayaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas. *1*, 654–661.

Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Bumi Aksara.

Hamid, N., Indriyanti, N., & Riyadi, A. (2023). *Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu*. 8–28. Https://Doi.Org/10.57254/Eka.V2i1.8

Jefri, M. (2021). Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja Di Lapas Kelas I Makassar. *Nusantara : Jurna Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*.

Jim, I. (2008). *Community Development*. Pustaka Pelajar.

Kaharuddin. (2021). Equilibrium: Jurnal Pendidikan Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi. *Pendidikan*, 1–8. Https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium

Kedungpane, B. (2023). *Profil Lapas Semarang, Peraih Predikat Pembinaan Narapidana Terbaik Tahun 2022*. Https://Kumparan.Com/Kedungpaneberita/Profil-Lapas-Semarang-Peraih-Predikat-Pembinaan-Narapidana-Terbaik-Tahun-2022-20iy7a7tlgm/Full

Mahmudah, R. (2017). Interaksi Mantan Narapidana Di Tengah Masyarakat (Studi Tentang Mantan Narapidana Di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *Jurnal Tentang Interaksi Mantan Narapidana Dan Pandangan Masyarakat*, *04*.

Maleong, L. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.

Marthalena, Y., & Jauhari, T. (2023). *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kotabumi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan*. *5*(2).

Maryani, Dedeh., R. Roselin. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=67nhdwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Tahapan+Pemberdayaan+Masyarakat+&Ots=Mzia3ht6zi&Sig=Vqay2vjeu95mvbcwlhveyunxv8q&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q=Tahapan Pemberdayaan Masyarakat&F=False

Najiati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut*. Wetlandsinternational-Indonesia Progamme.

Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 140–145.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Pustaka Cakra.

Nur Azizah Fitriana, A. (2021). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Madiun*. *7*(3), 6.

Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif:Konsep Dan Prosedurnya*. Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1104/1/Studi-Kasus-Dalam-Penelitian-Kualitatif.Pdf

Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *15*(2), 181. Https://Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2021.V15.181-198

Rencana Strategis Lapas Kelas I Semarang 2020-2024. (2024).

Rensiana, Mouritia, H. (2018). *Peran Lembaga Permasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Aksebilitas Narapidana Disabilitas Di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta*. Https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/17104/3/Hk105242.Pdf

Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali Uin Antasari Banjarmasin*. *17*(33), 81–95.

Riyadi, A. (2021). *Pengembangan Masyarakat-Upaya Dakwah Dalam Membentuk Kemandirian Masyarakat*. Fatawa Publishing.

Rizalhadizan. (2022). *Pengertian Kemandirian, Ciri, Macam, Tujuan, Faktor, Dan Contohnya*. Sosiologiku. Https://Sosiologiku.Com/Pengertian-Kemandirian-Ciri-Macam-Tujuan-Faktor-Dan-Contohnya/

Sadan, E. (2004). *Empowerment And Community Planing*. Hakibbutz Hameuchad Publisher.

Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia*, *6*(2), 158–178. Https://Jurnal.Ar-Raniry.Ac.Id/Index.Php/Justisia/Article/View/11535

Santoso, P. Dkk. (2022). *Pemberdayaan Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas Ii A Denpasar*. *1*(11), 2999–3006.

Saputra, F. (2020). Peranan Lapas Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Di Hubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, *8*, *No. 1,6*.

Search, I. (2023). *Perbedaan Lapas Kelas 1, 2, Dan 3 Di Indonesia*. Caramantap. Https://Www.Caramantap.Com/2023/05/Perbedaan-Lapas-Kelas-1-2-Dan-3-Di-Indonesia.Html

Sleman, L. P. K. I. B. (N.D.). *Sejarah Permasyarakatan*. Https://Lapassleman.Kemenkumham.Go.Id/Profil-2/Sejarah-Pemasyarakatan#:~:Text=Menurut Uu No. 12 Tahun,Sehinga Dapat Kembali Diterima Di

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Rnd*. Alfabeta, Cv.

Suharto, E. (2006). *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.

Suprayogo, I. Dan T. (2001). *Metode Penelitian, Sosial Agama*. Pt. Remaja Rosdakarya.

Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Progam Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan Dalam Memningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, *3*(2), 1–25.

Swilantari, N. K. M. (2022). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Strategi Koping Pada Warga Binaan Wanita Di Lembaga Permasyarakatan Banyuwangi Tahun 2022* [Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi]. Https://Eprints.Stikesbanyuwangi.Ac.Id/Id/Eprint/133/2/Bab I - Bab Iv.Pdf

Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Penerbit Teras.

Totok, Mardikanto, & Purwoeko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *2*(7).

W, D. D., Saleh, C., & Hadi, M. (2013). Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Tentang Program Kemandirian Pelatihan Kerja Pengelolaan Ikan Air Tawar Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Kota Pasuruan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, *1*(2), 174–180.

Wulandari, S. (2015). Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, *4*(Vol 4, No 2 (2015)), 87–94.

Yuli, M. (2023). *Pemberdayaan Dan Pembinaan Keagamaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Ii A Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tesis*.

Yuliani, P. A. (2014). Program Pembinaan Kemandirian Di Lembaga Pemasyrakatan Terbuka Klas Iib Jakarta. *Skripsi*, 1–167.

Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Kencana.

LAMPIRAN

Gambar 14.1 Wawancara dengan Bapak Hamdan, Kasubag Lapas Kelas 1 Semaran

Gambar 15.1 Wawancara dengan Ibu Sapto, Staf Kepegawaian

Gambar 16.1 Wawancara dengan Bapak Ridwan, staf kasubag Lapas Kelas 1 Semarang

Gambar 17.1 Wawancara dengan Bapak Nanda, staf bimker program pembinaan kemandirian

Gambar 18.1 Wawancara dengan Bapak Firman dan Bapak Nanda, staf bimker program pembinaan kemandirian.

Gambar 19.1 Wawancara dengan narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian

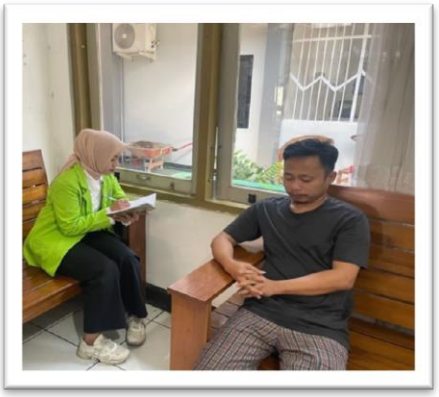

Gambar 20.1 Surat izin riset dari Kemenkum HAM Kanwil Jateng

KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA
KANTORWILAYAHJAWATENGAH
JalanDr.Cipto No.64Semarang50124Telepon/(024)3543063
Laman: jateng.kemenkumham.go.id – surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13.UM.01.01-130 19 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 23/Un.10.4/KKM.05.01/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Program Kemandirian Pada Lapas Kelas I Semarang ", yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Al Mira Fidela
NIM : 2001046041

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lapas Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shoting / video lingkungan Lapas tanpa silzin Kepala Lapas Kelas I Semarang
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Lapas Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Kadiyono
NIP. 196705281992031001

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagaiLaporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Gambar 21.1 Surat izin riset dari UIN Walisongo

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 23/Un.10.4/KKM.05.01/01/2024 Semarang, 15/01/2024
Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama	:	Al Mira Fidela
NIM	:	2001046041
Jurusan	:	Pengembangan Masyarakat Islam
Lokasi Penelitian	:	Lapas Kedunggaram Semarang
Judul Skripsi	:	Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Program Kemandirian Pada Lapas Kedunggaram Semarang

Bermaksud melakukan Riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

AUNTORIA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Gambar 22.1 Surat izin pra riset dari UIN Walisongo

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 48/Un.10.4/K/KM.05.01/02/2024 Semarang, 26/02/2024
Hal : ***Permohonan Ijin Pra Riset***

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Al Mira Fidela
NIM : 2001046041
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Pemberdayaan Warga Binaan Melalui Program Pembinaan Kemandirian Pada Lapas Kedungpane Semarang

Bermaksud melakukan Pra riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

MUNTOHA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Surat ini dibuat secara elektronik oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Gambar 23.1 Data WBP berdasarkan kasus & lama pidana di Lapas Kelas 1 Semarang

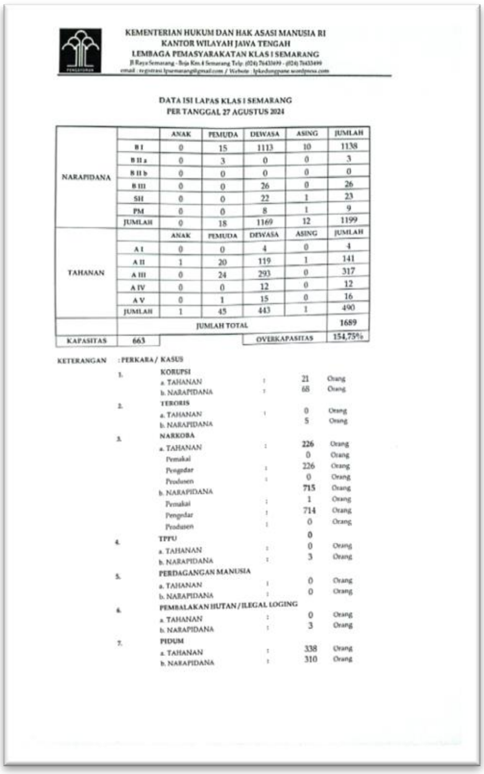

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG
Jl Raya Semarang - Boja Km.4 Semarang Telp. (024) 76433499 - (024) 76433499
email : registrasi.lpsemarang@gmail.com / Website : lpkedungpane.wordpress.com

DATA ISI LAPAS KLAS I SEMARANG
PER TANGGAL 27 AGUSTUS 2024

		ANAK	PEMUDA	DEWASA	ASING	JUMLAH
NARAPIDANA	B I	0	15	1113	10	1138
	B II a	0	3	0	0	3
	B II b	0	0	0	0	0
	B III	0	0	26	0	26
	SH	0	0	22	1	23
	PM	0	0	8	1	9
	JUMLAH	0	18	1169	12	1199
TAHANAN		ANAK	PEMUDA	DEWASA	ASING	JUMLAH
	A I	0	0	4	0	4
	A II	1	20	119	1	141
	A III	0	24	293	0	317
	A IV	0	0	12	0	12
	A V	0	1	15	0	16
	JUMLAH	1	45	443	1	490
	JUMLAH TOTAL					1689
KAPASITAS	663			OVERKAPASITAS		154,75%

KETERANGAN : PERKARA / KASUS

1. KORUPSI
a. TAHANAN : 21 Orang
b. NARAPIDANA : 68 Orang

2. TERORIS
a. TAHANAN : 0 Orang
b. NARAPIDANA 5 Orang

3. NARKOBA
a. TAHANAN : 226 Orang
Pemakai 0 Orang
Pengedar : 226 Orang
Produsen : 0 Orang
b. NARAPIDANA 715 Orang
Pemakai : 1 Orang
Pengedar : 714 Orang
Produsen : 0 Orang

4. TPPU 0
a. TAHANAN : 0 Orang
b. NARAPIDANA : 3 Orang

5. PERDAGANGAN MANUSIA
a. TAHANAN : 0 Orang
b. NARAPIDANA : 0 Orang

6. PEMBALAKAN HUTAN / ILEGAL LOGING
a. TAHANAN : 0 Orang
b. NARAPIDANA : 3 Orang

7. PIDUM
a. TAHANAN : 338 Orang
b. NARAPIDANA : 310 Orang

Table 8.1 Data WBP Yang Mengikuti Progam Pembinaan Kemandirian (Bimbingan Kerja)

NO	NAMA	KASUS	UNIT
1	Eko Suharto	Narkotika	Krupuk
2	Dedi Sulistiono	Narkotika	Krupuk
3	Yayak Agus Zamzami	Narkotika	Krupuk
4	Imam Santoso	Korupsi	Tempe
5	Ahmad Anas	Narkotika	Krupuk
6	Sudrajat	Narkotika	Laundry
7	Dony Christiawan E. W	Pidana Umum	Laundry
8	Kukuk Endit Prasetyo	Narkotika	Laundry
9	Hanafi Maulana	Narkotika	Laundry
10	Ichsan Haryanto	Pidana Umum	Batik
11	Andy Kurniawan	Narkotika	Penjahitan
12	R. Ledha Ariawan Nugroho	Narkotika	Penjahitan
13	Sutiyanto	Pidana Umum	Batik
14	Ruseto Sukmowijoyo	Narkotika	Penjahitan
15	Bejo Utomo	Narkotika	Batik
16	Didi Triono	Narkotika	Laundry
17	Joko Wahyu Wibowo	Narkotika	Any. Rotan Sint.
18	Herri Utomo	Narkotika	Penjahitan
19	Rullie Yudhistira	Narkotika	Penjahitan
20	Untung	Narkotika	Kebersihan
21	Agus Santoso	Pidana Umum	Penjahitan
22	Roman Romawan	Narkotika	Penjahitan
23	Muhammad Ardi Setiawan	Narkotika	Kebersihan
24	Johannes Wahju Pudji. S	Korupsi	Pertanian
25	Yulistiawan Sri Hartanto	Korupsi	Pertanian
26	Sugito	Korupsi	Pertanian
27	Ir. Sahrul	Korupsi	Pertanian

28	Sanyoto Setyo Putro	Narkotika	Batik
29	Agus Hermawan	Narkotika	Batik
30	Davit Sanjaya Saputra	Narkotika	Batik
31	Nursalim	Narkotika	Batik
32	Rio Maulana	Narkotika	Batik
33	Andika Bagus	Narkotika	Batik
34	Andi Muhammad Qais	Narkotika	Penjahitan
35	Indra Triandana Yudha	Narkotika	Sablon
36	Septiandre Dian Agung. D	Narkotika	Sablon
37	Dwi Widiyanto	Korupsi	Bakery
38	Naufal Liring Aditya	Korupsi	Bakery
39	Sapta Hadi Dwi. A	Narkotika	Bakery
40	Ahmad Ridwan	Narkotika	Bakery
41	Agus Slamet	Narkotika	Bakery
42	Iman Wijaya	Pidana Umum	Handycraft
43	Sigid Hartanto	Narkotika	Bakery
44	Abdullah Lutfi Husin	Pidana Umum	Perikanan
45	Slamet Riyanto	Pidana Umum	Perikanan
46	Maman Abdulrachman	Narkotika	Kebersihan
47	Ahmad Amar Kairudin	Pidana Umum	Any. Rotan Sint.
48	Aditya Bagoes Oktavianto	Narkotika	Any. Rotan Sint.
49	Sugiarto	Narkotika	Any. Rotan Sint.
50	Ganang Prasetyo Adi. S	Narkotika	Any. Rotan Sint.
51	Purnomo	Narkotika	Any. Rotan Sint.
52	Christian Tri. Y	Pidana Umum	Any. Rotan Sint.
53	Kasdi	Narkotika	Any. Rotan Sint.
54	Ponco Rudi Sugiyanto	Narkotika	Any. Rotan Sint.
55	Yoga Septiaji	Narkotika	Any. Rotan Sint.
56	Endra Eliyanto	Narkotika	Any. Rotan Sint.
57	Masnan Mushofa	Narkotika	Any. Rotan Sint.

58	Alfa Ardiansyah	Narkotika	Any. Rotan Sint.
59	Sugeng Haryanto	Narkotika	Es Batu
60	Mahesa Wisa Samara	Narkotika	Perkayuan
61	Ulil Huda	Narkotika	Perkayuan

1. Draft Wawancara

   Pertanyaan yang ditujukan untuk kabid dan petugas program pembinaan kemandirian pada Lapas Kelas 1 Semarang :

   1. Apa saja tujuan utama dari program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Kedungpane Semarang?

      : *"Program pembinaan kemandirian di Lapas Kedungpane Semarang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan agar mereka bisa mandiri setelah bebas nanti. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian mereka sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk membuka peluang usaha di masa depan."*
   2. Apa saja keterampilan yang ada di program pembinaan ini ?

      : "*Disini ada 17 unit keterampilan mbak yaitu, penjahitan, batik, kerupuk, kaligrafi, perikanan, mendoan, bakery, eceng gondok, potong rambut, laundry, esbatu, las kayu, rotan sintesis, pertanian, sablon, kerajinan (handycraft), kebersihan."*
   3. Bagaimana pembagian tupoksi petugas lapas terhadap program ini?

      : "Didalam program ini kita saling membantu satu sama lain mba"
   4. Kapan jadwal dimulainya pelaksanaan program pembinaan ini?

      : "Dari jam 08.00 sampai jam 15.00 mbak
   5. Pengawasan seperti apa yang dilakukan dari petugas dalam program ini?

      : "Pengawasan tidak hanya terbatas pada aspek teknis pelatihan, tetapi juga keamanan. Mengingat bahwa ini adalah lingkungan lapas, kami memastikan bahwa setiap aktivitas warga binaan selama

pelatihan tetap dalam pengawasan yang ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga memantau komunikasi dan interaksi antar warga binaan selama program untuk memastikan suasana kondusif dan mendukung proses pembelajaran.

6. Bagaimana proses seleksi atau penentuan keterampilan atau pelatihan yang diberikan kepada warga binaan dalam program pembinaan kemandirian?

   : "*Proses seleksi atau penentuan keterampilan yang diberikan kepada warga binaan diawali dengan asesmen awal. Saat mereka masuk ke lapas, kami melakukan wawancara dan penilaian untuk mengetahui latar belakang, minat, serta keterampilan yang mungkin sudah mereka miliki sebelumnya. Dari situ, kami bisa mengarahkan mereka ke program yang sesuai."*

7. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan program pembinaan kemandirian di Lapas Kedungpane Semarang?

   : "Tantangannya adalah perbedaan latar belakang dan kemampuan warga binaan. Ada yang memang sudah memiliki keterampilan dasar, sehingga lebih mudah mengikuti pelatihan, tapi ada juga yang benar-benar awam. Bagi yang tidak memiliki keterampilan dasar, proses belajar terkadang lebih lambat, sehingga membutuhkan kesabaran ekstra dari para instruktur. Dan juga kurangnya motivasi dari narapidana itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kamu mbak."

8. Apakah terdapat kerjasama atau keterlibatan pihak eksternal dalam mendukung program pembinaan kemandirian di Lapas Kedungpane Semarang?

   : *"Tentu, dalam menjalankan program pembinaan kemandirian di Lapas Kedungpane, kami tidak bekerja sendiri. Ada banyak pihak eksternal yang terlibat dalam mendukung program ini. Misalnya, kami bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan, lembaga pelatihan, dan beberapa perusahaan lokal yang memberikan bantuan baik dalam bentuk pelatihan maupun penyediaan alat dan bahan."*

9. Apa harapan dan rencana kedepan dari Kabid Program Pembinaan Kemandirian untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari program tersebut?

   : *"Ke depan, kami berharap agar program pembinaan kemandirian di Lapas Kedungpane bisa semakin efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi warga binaan. Salah satu rencana kami adalah memperluas jangkauan kerja sama dengan pihak eksternal, baik itu dengan perusahaan swasta, lembaga pelatihan, maupun pemerintah daerah. Dengan kerjasama yang lebih luas, kami berharap bisa menghadirkan lebih banyak program pelatihan yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini."*

Pertanyaan yang akan diajukan untuk warga binaan pada Lapas Kelas 1 Semarang :

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang program pembinaan kemandirian yang telah diikuti di Lapas Kelas 1 Semarang?

   : *"Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program pembinaan kemandirian ini. Sebelum mengikuti program, saya tidak punya keterampilan khusus yang bisa saya andalkan setelah keluar dari sini. Program ini tidak hanya memberikan saya keterampilan teknis, tapi juga membentuk pola pikir saya untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya merasa bahwa program ini benar-benar memberikan saya kesempatan kedua, dan saya melihat bahwa banyak teman-teman di sini juga mendapatkan manfaat yang sama. Akan tetapi juga masih ada bebrapa teman saya yang belum termotivasi akan program ini."*
2. Apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Bapak dalam mengikuti program pembinaan kemandirian ini?

   : *"Iya, ada beberapa hambatan yang saya rasakan selama mengikuti program ini. Salah* satunya *soal adaptasi. Di awal, saya merasa cukup sulit untuk beradaptasi dengan pelatihan, terutama karena sebagian dari kami tidak punya pengalaman sebelumnya dalam bidang yang*

diajarkan, jadi perlu waktu untuk bisa benar-benar memahami materi, apalagi jika dibandingkan dengan teman-teman yang sudah punya dasar. Selain itu, ada juga tantangan mental. Tidak mudah untuk tetap termotivasi setiap hari. Kadang muncul rasa ragu, terutama saat memikirkan bagaimana kehidupan nanti setelah bebas. Apakah keterampilan yang saya dapatkan di sini bisa benar-benar diterapkan di luar? Tapi untungnya, ada dukungan dari instruktur dan sesama teman di program ini, yang terus mendorong untuk tetap semangat."

3. Bagaimana Bapak menilai dukungan dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan program pembinaan kemandirian?

4. : *"fasilitas disini sudah cukup baik, kami mnedapatkan fasilitas yang tercukupi selama program berjalan."*

5. Apakah Bapak memiliki saran atau masukan untuk perbaikan atau peningkatan program pembinaan kemandirian di Lapas Kel Semarang?

6. : *"memberikan lebih banyak waktu untuk praktek langsung. Kadang, waktu yang diberikan untuk praktek terasa terbatas, dan lebih banyak waktu praktek akan membantu kami memahami dan menguasai keterampilan dengan lebih baik. Terakhir, mungkin juga bisa dipertimbangkan adanya program mentoring atau bimbingan untuk kami yang telah menyelesaikan pelatihan. Program semacam ini bisa membantu kami dalam transisi ke dunia luar, seperti memberikan panduan dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri.*

Saya yakin dengan beberapa peningkatan ini, program pembinaan kemandirian di sini bisa menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kami semua."

7. Bagaimana harapan Bapak terhadap masa depan setelah mengikuti program pembinaan kemandirian ini?

: *"Setelah mengikuti program pembinaan kemandirian ini, saya sangat berharap bisa memulai lembaran baru dalam hidup saya. Program ini telah memberikan saya keterampilan dan pengetahuan yang saya rasa akan sangat berguna setelah saya bebas nanti."*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Al Mira Fidela
NIM	: 2001046041
Tempat/tanggal lahir	: Bandung, 30 Juni 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Tenongan RT 04 RW 09, Jendi, Selogiri, Wonogiri
No Hp	: 081359451437
E-mail	: mirafidela30@gmail.com
Riwayat Pendidikan	
SD	: SD Negeri Bulu
SMP	: Mts Al Ma'arif 1 Tirtomoyo
SMA	: MA Salafiyah Kajen
Perguruan Tinggi	: UIN Walisongo Semarang
Orang Tua / Wali	
Nama Ayah	: Heri Jauhari
Nama Ibu	: Sri Handayani